

# MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



## BUMI DALAM KANTONG PLASTIK

---

Berabad lamanya, bumi terperangkap jerat sampah plastik. Karakteristik plastik yang sulit diurai mengancam bumi beserta mahluk hidup di dalamnya. Masifnya penggunaan kantong plastik mendominasi populasi sampah plastik. Cukai kantong plastik menjadi jalan. Demi keberlangsungan lingkungan kini dan nanti

# Daftar Isi



Limbah kantong plastik membutuhkan waktu antara 20 hingga 500 tahun untuk dapat terurai. Fakta ini menimbulkan ancaman kerusakan bumi dan lingkungannya. Ancaman inilah yang kami gambarkan dengan sebuah globe yang terbungkus kantong plastik.

**MEDIA KEUANGAN** adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

**MEDIA KEUANGAN** saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiarta. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistiyi. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediageuangan@kemenkeu.go.id.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.*

- 5 **DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 **EKSPOSUR**
- 10 **LINTAS PERISTIWA**
- 14 **TOPIK PILIHAN**
- 15 **TAGAR**
- LAPORAN UTAMA**
- 17 Darurat Sampah Bukan Fatamorgana
- 20 Infografik
- 22 Pilihan Tepat Lagi Moderat
- 25 Alihkan Kebiasaan Demi Lingkungan
- 27 Cukai Plastik untuk Lingkungan Lebih Baik

- TRIVIA**
- 29 Tahukah Kamu?

- WAWANCARA**
- 30 Kian Agresif Menembus Pasar

- FIGUR**
- 34 Menjalani Peran Ganda dalam Harmoni

- OPINI**
- 37 Menilik Pemerintah Berwirausaha

- OPINI**
- 40 Dana Abadi Penelitian dan Simplifikasi Birokrasi

- POTRET KANTOR**
- 42 Sinergi Membangun Negeri

- PROFESI**
- 44 Srikandi Pantang Surut Nyali

- REGULASI**
- 46 Berpotensi Merusak Lingkungan, Barang Impor Wajib Diekspor Kembali

- GENERASI EMAS**
- 48 Kerja Adhul Menerangi Indonesia

- BUGAR**
- 51 Jerat Kanker Prostat

- RENUNGAN**
- 52 Terba(l)ik

- BUKU**
- 53 New York, Titik Temu Dua Insan yang Kehilangan

- LOKAL**
- 54 Daya Pikat Tarek Pukat

- FINANSIAL**
- 56 Rencana Keuangan Menuju Keluarga Bahagia



**IKUT LELANG DIMANA SAJA!**

Segera unduh aplikasi Lelang Indonesia



## Mengontrol Konsumsi Plastik Melalui Cukai

**K**etika menerima suguhan air mineral dalam botol plastik, secara spontan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolaknya, begitu juga dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kejadian ini berlangsung saat keduanya menjadi pembicara dalam seminar nasional Gerakan Nasional 1.000 *Startup* Digital Satu Indonesia. Wajar saja kedua menteri yang sangat sadar akan lingkungan itu menolaknya. Tentu keduanya tidak mau menambah lagi jumlah sampah plastik di Indonesia, karena berdasarkan penelitian, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik ke laut terbesar di dunia.

Berdasarkan data KLHK yang dikeluarkan pada tahun 2016, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik setiap tahun. Sampah tersebut dihasilkan oleh kurang lebih 90 ribu gerai retail modern di seluruh Indonesia. Sementara itu plastik membutuhkan waktu antara 20 hingga 500 tahun untuk dapat terurai. Dapat dibayangkan betapa tumpukan sampah di Indonesia dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

Pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu fungsi pajak dalam bernegara selain redistribusi pendapatan masyarakat dan pengumpulan penerimaan negara



adalah fungsi regulator yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Pajak yang dikenal dengan istilah *sin tax* ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi atau penggunaan produk tertentu yang dianggap konsumtif atau merugikan masyarakat umum. Contohnya adalah cukai pada rokok dan minuman keras serta pajak penjualan barang mewah untuk produk-produk tertentu. Fungsi pajak ini dapat dikenakan pada produk plastik dengan maksud untuk mengurangi penggunaan plastik di masyarakat sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya sampah plastik.

Pengendalian konsumsi dengan mekanisme cukai pada plastik sesuai untuk diterapkan karena besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter

barangnya. Semakin lama jenis plastik tersebut dapat diurai, maka dapat dikenakan cukai yang lebih tinggi. Selain itu, cukai juga efektif untuk mengendalikan peredaran plastik karena terdapat kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap fisik (dalam hal ini plastik) yang dikenakan cukai.

Tentu saja akan ada selalu pro dan kontra terkait pengenaan pajak berbentuk cukai ini. Walaupun cukai plastik tidak terlalu besar nilainya, bisa jadi akan menimbulkan kenaikan harga barang pada produk-produk tertentu sehingga berdampak pada laju inflasi. Disinilah pentingnya dialog dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar mendapatkan nilai yang wajar bagi cukai plastik tanpa harus menggerus pertumbuhan ekonomi.

Tidak lupa, peran DPR sebagai wakil rakyat juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan baru ini. Secara umum tujuan utamanya dapat disetujui oleh semua elemen masyarakat. Kita tidak ingin generasi penerus bangsa terbebani limbah plastik yang dapat bertahan sampai ratusan tahun. Hal ini harus dapat dicegah oleh kita semua.

**Nufransa Wira Sakti,**  
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

## SRI MULYANI MENARI

**D**alam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Indonesia, Kemenkeu menggelar upacara bendera di lapangan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Setelah memimpin jalannya upacara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti langsung *flash mob* tarian daerah. Tarian ini merupakan apresiasi Kemenkeu kepada bangsa Indonesia yang beragam tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu semangat kebangsaan, Bangsa Indonesia.

Foto  
Rizky Agusta





## SENYUM DI KAMPUNG ADAT BENA

**S**enyum itu merintis tawaran.  
Senyum itu menggalang perasaan.  
Senyum itu membangun ikatan.  
Sebuah senyum ramah dari  
warga di sepetak pelataran  
kampung Bena, Ngada, Flores, Nusa  
Tenggara Timur. Pada selepas siang yang  
terselimut mendung di kaki Gunung Inerie  
yang menjulang.

Foto  
Andi Abdurrochim





## 16/08 Presiden Arahkan RAPBN 2020 untuk Penguatan SDM

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2020 beserta Nota Keuangan pada rapat paripurna DPR RI, Jumat (16/08). Pada pidatonya, Presiden mengungkapkan tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Ia berpesan agar bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bonus tersebut harus dipastikan agar mampu dijadikan sebagai lompatan kemajuan. Indonesia harus mampu membangun generasi yang bertalenta, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan kemajuan dunia digital.

"Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju," ujar Presiden.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu: pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab

tantangan demografi dan antisipasi *aging population*. Keempat, sembilan penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

"Dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi," ungkap Presiden. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun. Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, Presiden berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.

Selanjutnya, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi. "Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," tukas Presiden.

## 24/07

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI



## AIFC 2019, Paparkan Beragam Skema Pembiayaan SDGs

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, memberikan *keynote speech* pada acara The 4th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) sejalan dengan target Indonesia yang ingin menyukseskan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs). "Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan menengah yang ingin lompat ke negara berpendapatan tinggi juga memiliki target pembangunan nasional yang sejalan dengan target SDG. Namun, isu gap kebutuhan dana juga masih menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, pemerintah terus berinovasi menciptakan berbagai skema pembiayaan," ujarnya di Ballroom Hotel JW Marriot, Surabaya, Rabu (24/07). Melalui berbagai program pada *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Pemerintah berusaha untuk mencapai SDG. Salah satunya dengan membuat sebuah platform terintegrasi disebut *SDG One*.



## 25/07

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Menkeu: Pemerintah Peduli Kebudayaan dan Seni

Pemerintah memberikan perhatian pada kehidupan kebudayaan dan seni dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Selain itu, dalam anggaran Transfer ke Daerah terdapat elemen yang mendukung agar pemerintah daerah juga peduli terhadap kebudayaan dan seni. "Kita berharap dengan gerakan yang sama antara pemerintah dan dunia artis itu sendiri dan *stakeholders* besar dan para *foundation* akan dapat memperkuat tidak hanya kepeduliannya tapi juga posisi Indonesia dalam peta dunia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi peningkatkan martabat kita sebagai suatu bangsa. Presiden telah menyampaikan untuk membuat semacam dana abadi untuk kebudayaan dan seni, dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan untuk mewujudkannya," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara peresmian pembukaan Artjog Festival 2019 pada Kamis, (25/07). Ia mengapresiasi Artjog yang sudah sebelas tahun diselenggarakan. *Event* ini menjadi ajang bagi seluruh *stakeholder* seni untuk berinteraksi.

## 29/07

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Keterbukaan Informasi Publik, Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2019 di Aula Gedung Djuanda Kemenkeu pada Senin (29/07). "Ini adalah bagian dari tanggung jawab dan sekaligus akuntabilitas kita. Ini juga merupakan apa yang disebut pondasi tata kelola yang baik, *good governance* keterbukaan transparansi informasi yang akurat, kredibel dan detail, memang merupakan sesuatu yang berhak untuk diperoleh oleh masyarakat mengenai pemerintahan baik itu kementerian, lembaga maupun badan publik," ujar Menkeu.





30/07

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### KSSK: Sistem Keuangan Triwulan II 2019 Baik

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada rapat berkala Jumat, (26/07) di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta, menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan triwulan II 2019 terjaga dengan baik. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers KSSK di Bank Indonesia (BI), Jakarta pada Selasa (30/07). “Stabilitas sistem keuangan domestik tetap baik. Ini, ditopang industri perbankan yang tetap sehat dan pasar keuangan domestik yang cukup kondusif,” jelas Menkeu. Ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu pertama, ketidakpastian pasar keuangan global menurun di mana bank-bank sentral di negara maju dan negara berkembang melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Kedua, imbal hasil portofolio investasi Indonesia masih menarik. Ketiga, membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia.

31/07

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI



### Orasi Ilmiah Menkeu pada Katadata Forum

Untuk memunculkan sebuah ekosistem yang menunjang produktivitas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa dalam APBN 2019 telah dianggarkan dana penelitian sebesar Rp35,7 triliun yang tersebar di 45 kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan *endowment fund* atau dana abadi untuk penelitian sebesar Rp990 miliar yang akan dapat digunakan oleh universitas-universitas. “Bicara ekosistem, pemihakan dari APBN harus dilakukan bukan karena mandat konstitusi tapi kita percaya belanja di bidang penelitian dapat menghasilkan tingkat pengembalian hingga 20 persen,” jelasnya saat memberikan orasi ilmiah pada Katadata Forum di Soehanna Hall The Energy Building, Rabu (31/07). Pada acara yang mengangkat Tema “Mencari Model Pengelolaan Dana & Pengorganisasian Riset untuk Indonesia” ini, Menkeu juga menyampaikan pentingnya membuat sebuah kebijakan berdasarkan data dan bukti (*evidence based*). Penelitian, menurutnya adalah bagian tidak terpisahkan dari usaha peningkatan kualitas produktivitas dan inovasi.

02/08

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI



### Menkeu Ajak KADIN Bangun Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bicara santai dengan para pengusaha di acara Kadin Talks. Ia mengajak para pengusaha untuk bersama-sama membangun Indonesia agar ekonomi tumbuh makin kuat. “Seperti saya yang mendapat panggilan hidup untuk kembali berbakti kepada negara, sekarang saya mengajak Anda semua untuk juga membangun Indonesia karena negara Anda juga memanggil Anda,” pesan Menkeu kepada seluruh pengusaha yang hadir di Kadin Lounge, Jumat (02/08). Saat bincang-bincang di acara yang dimoderatori oleh Ketua Kadin, Rosan Roeslani, Menkeu menceritakan banyaknya masukan dari pengusaha mengenai tarif pajak. Ia berkata pengusaha adalah partner kerja pemerintah dan ia berharap pengusaha tidak melihat pemerintah sebagai pengganggu kemajuan usaha.

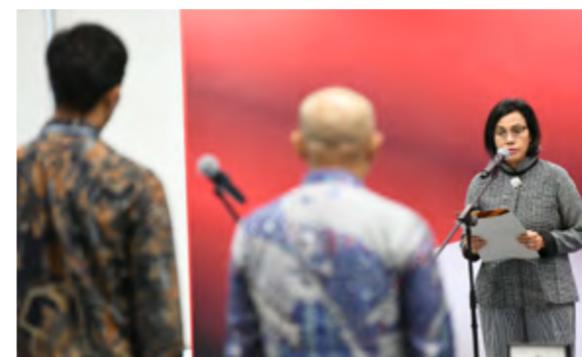
09/08

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### Pesan Wamenkeu Pada Mahasiswa IPDN: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjelaskan bahwa sinergi, integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan guna mengatasi tantangan akuntabilitas di era desentralisasi dan otonomi daerah. “Oleh karena itu, saya kira kalau mahasiswa setelah lulus dari IPDN itu bisa membantu dalam hal menambah percepatannya, bisa menambah kecepatannya sehingga laju pembangunan daerah di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota akan membesar dan mempercepat proses pembangunan nasional,” ujar Wamenkeu dalam Seminar Nasional yang bertema “Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang Transparan dan Akuntabel” di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bukittinggi, Sumatera Barat pada Jum’at (09/08). Wamenkeu menekankan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset tetap harus diperhatikan. Sebab, rendahnya *asset awareness* pada sektor publik menyebabkan inefisiensi. Tidak hanya harus tercatat tapi juga termanfaatkan.



16/08

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

### Harapan Menkeu Terhadap Dirut dan Direksi PT SMI yang Baru

Menteri Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan harapannya kepada Direktur Utama (Dirut) Edwin Syahrudaz dan Direksi baru Darwin Trisna Djajawinata PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) agar mampu membawa PT SMI lima tahun ke depan lebih cepat dari sepuluh tahun yang lalu. PT SMI merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Saya harap Saudara Edwin yang sudah turut membesarkan PT SMI selama kurang lebih tujuh tahun bisa terus mengembangkan pemikiran, dedikasi, kreativitas, loyalitas, dan kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Dirut,” harap Menkeu di aula kantor PT SMI pada Jumat, (16/08). Menkeu berpesan agar Dirut PT SMI mampu melihat dari perspektif yang lebih luas. Mampu mengidentifikasi peluang, tantangan, dan resiko yang akan dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja PT SMI.



# Optimis Namun Hati-Hati

Teks Reni Saptati D.I

Dalam Pidato Nota Keuangan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, tetapi tetap terarah dan terukur. Target pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu isu dalam Nota Keuangan yang hangat diperbincangkan masyarakat. Presiden menyebutkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 ditargetkan 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai penggerak utama. Angka ini lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen. Pemerintah optimistis investasi terus mengalir ke dalam negeri lantaran adanya persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi.

Menanggapi target yang telah dicanangkan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan target memang tersebut harus dikejar, walaupun saat ini kondisi perekonomian global tengah menunjukkan tren perlambatan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi ekonomi global 2020 masih menantang, ada beberapa risiko dari tantangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia melemah dan

itu akan menjadi *downside risk* dari asumsi makro dalam RAPBN.

Kalangan pengusaha dan pengamat turut memberi respons terhadap target laju ekonomi 2020. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, *tone*-nya memang optimis, lamun pemerintah sepertinya cukup berhati-hati. Menurut Hariyadi, sejumlah target yang yang ditetapkan itu masih terkendali atau dalam batas yang bisa dicapai. Pandangan berbeda diutarakan Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani. Ia menilai jika hingga akhir tahun pendorong pertumbuhan hanya terus bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, target 5,3 persen masih terlalu ambisius. Menurutnya, target 5,3 persen akan sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam memacu produktivitas nasional, khususnya ekspor dan investasi. Sementara itu, peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat asumsi pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,3 persen sebenarnya tidak beranjak dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Artinya, perekonomian nasional tidak jauh lebih baik dari tahun ini.

## TOPIK LAIN

Asuransi aset negara mulai mendapat perhatian masyarakat menyusul rencana implementasinya pada September 2019. Dengan demikian, konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) akan segera menunaikan tugasnya pada kuartal IV-2019. Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara mengatakan pihaknya sedang membahas teknis ABMN dengan konsorsium, sedangkan terkait aset yang diajukan masih harus melalui seleksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya, pada tahap kedua tahun 2020 nanti, ABMN akan menjamin 40 aset K/L. Kemudian, pada tahun 2021, program ABMN akan diberlakukan penuh di seluruh K/L. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiary Dalimunthe pun berharap September 2019 nanti ABMN sudah mulai berjalan.

Foto Irfan Bayu P

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

-  www.kemenkeu.go.id
-  KemenkeuRI
-  @KemenkeuRI
-  KemenkeuRI
-  KemenkeuRI
-  majalahmediakeuangan



**@majalahmediakeuangan** Sampaikan secara singkat optimisme Anda terkait target pertumbuhan nasional dalam RAPBN 2020 yang naik dari tahun sebelumnya di tengah kondisi ekonomi yang menantang



Like

Reply



**@itsnothings\_** Kita sebagai warga negara Indonesia punya andil dalam membangun bangsa ini, salah satunya dengan mendukung dan mengawal perubahan positif yang sudah atau sedang pemereintah lakukan.



**@suhermanjuhari** Target optimis pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 5,3% perlu didukung pembangunan yang berbasis keberlangsungan lingkungan, seperti penerbitan *green sukuk*. Dengan masyarakat aktif berinvestasi, menjadi indikator berhasilnya pembangunan SDM Indonesia.



**@josuapaul** Regulasi merupakan komponen penting dalam perbaikan iklim investasi. Regulasi yang menghambat perbaikan iklim investasi akan dibongkar, yang tumpang tindih akan diharmonisasi. Sehingga sangat mungkin target laju ekonomi 2020 sebesar 5,3 persen tercapai.



**@KemenkeuRI** Sampaikan optimismemu terkait kebijakan cukai plastik sebagai alternatif solusi guna membatasi penggunaan kantong plastik demi lingkungan Indonesia yang lebih baik ke depan



Like

Reply



**@riszhw** Kebijakan cukai plastik terutama pd tingkat produsen akan berpengaruh besar thd penggunaan plastik di lapisan masyarakat. Hal ini solusi yg baik, mengingat sampah plastik di Indonesia sudah sangat memcemari lingkungan...



**@\_satri** Namun menurut pendapat saya, aksi pemerintah tidak hanya berhenti dikenakannya cukai plastik tersebut perlu sosialisasi dan transfer education kepada masyarakat



**@NingsihKusmi** Di mulai hal hal kecil dari diri kita, orang orang terdekat kita, untuk tidak menggunakan kantong plastik, sedikit demi sedikit kita sosialisasikan kepada masyarakat sekitar kita tingkat RT misalnya ...

# DARURAT SAMPAH BUKAN FATAMORGANA

Akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan baik bisa jadi bencana. Celakanya, permasalahan sampah di Indonesia menyangkut banyak dimensi. Sampah plastik menjadi salah satu yang paling disoroti. Selain butuh ratusan tahun agar bisa diurai alam, sampah plastik yang tidak terkelola dan berakhir di lingkungan, berpotensi mencemari dan mencelakai ekosistem.

**P**ersoalan sampah plastik ini, nyatanya bukan hanya menjadi masalah negara berkembang, melainkan juga negara-negara besar di dunia. Fenomena terkait ekspor kertas bekas yang disusupi sampah plastik oleh negara maju mengisyaratkan sampah plastik telah menjadi isu global. Kajian Laporan Sintetis yang diinisiasi Bank Dunia bersama sejumlah lembaga peneliti di Indonesia pada 2018 menyebutkan, tidak kurang dari 150 juta ton plastik telah mencemari lautan dunia. Asia Timur ditengarai sebagai wilayah dengan pertumbuhan produksi sampah tercepat di dunia.

Penelitian yang dilakukan Jenna R. Jambeck pada 2015 menegaskan hal serupa. Dari total 192 negara

yang dikaji, sebanyak lima negara di Kawasan Asia Timur bertanggung jawab atas lebih dari setengah sampah plastik yang ada di lautan. Mirisnya, dari kelima negara tersebut, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok. Disusul dengan Vietnam, Filipina, dan Thailand. Total sampah plastik Indonesia yang berakhir ke laut diketahui mencapai 187,2 juta ton.

Sampah laut hanyalah bagian dari masalah yang lebih kompleks, yaitu pengelolaan sampah. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkapkan, setidaknya ada enam masalah mendasar terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Pertama, rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam

Selain mencemari dan mencelakai ekosistem, timbunan sampah yang menggunung berpotensi terjadinya longsor

Foto  
Anas Nur  
Huda

mengelola sampah. Kedua, ketidakpedulian masyarakat Indonesia dengan lingkungan. Ketiga, tren sampah yang semakin meningkat. Keempat, rendahnya tanggung jawab industri. Kelima, masalah regulasi. Keenam, terkait impor sampah.

### Wewenang daerah

Terkait rendahnya kapasitas pemerintah daerah (pemda), Novrizal menuturkan, sejak 1974 kewenangan pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat telah didelegasikan kepada daerah. “Pertama kali otonomi itu diberikan salah satunya mengenai pengelolaan sampah,” ujarnya. Sayangnya, menurut Novrizal, berdasarkan Program Adipura yang dilakukan KLHK, diketahui sampah yang tertangani dengan benar baru mencapai 32 persen dari sekitar 415 kabupaten/kota di Indonesia.

“Artinya 28 persen sampah itu langsung dirilis ke lingkungan. Ada yang dibakar, dibuang ke sungai, dan sebagainya,” jelasnya. Sementara itu, lanjutnya, 40 persen sisanya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) secara *open dumping*.

Padahal, pemerintah telah merekomendasikan pengelolaan sampah secara *sanitary landfill*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menggariskan ketentuan ini. Pada tahun pertama sejak aturan tersebut diundangkan, pemda masih diperbolehkan menggunakan sistem *open dumping*. Namun setelahnya, pemda harus melakukan penutupan pada *open dumping* paling lambat lima tahun setelahnya. Itu berarti pada 2013, sistem *sanitary landfill* sudah harus diterapkan.

Peneliti Madya pada Badan Kebijakan Fiskal sekaligus pemerhati lingkungan, Joko Tri Haryanto, mengungkapkan prinsip *sanitary landfill* adalah menimbun sampah ke bawah dengan tanah, lalu ditanami dengan tanaman yang memiliki kemampuan menangkap gas metana yang dihasilkan sampah. “Begitu kapasitasnya (TPA) sudah misalnya 30 meter ke bawah,

nanti dipindahkan lagi,” jelasnya.

Namun pada praktiknya, sejumlah TPA masih melakukan praktik *open dumping* yaitu menumpuk sampah begitu saja. Akibatnya, terjadi timbunan sampah yang menggunung. Pengelolaan dengan sistem *open dumping* membahayakan karena berpotensi longsor, sebagaimana yang terjadi di Leuwi Gajah. “Bagaimana tidak ambruk? Bayangkan itu 30 meter. Dan sampah ini terus berproduksi, karena masyarakat kita setiap detik menghasilkan sampah,” ungkap Joko.

Novrizal memperkirakan, keterbatasan anggaran menjadi sebab sulitnya pelaksanaan *sanitary landfill* oleh pemda. “Padahal Kementerian PU itu mendesain (TPA) untuk *sanitary landfill*, tapi begitu dioperasionalkan, (pelaksanaannya) menjadi *open dumping*. Itu karena *operastional cost*-nya tidak dimiliki oleh daerah,” ungkapnya. Ia juga menilai, pengenaan retribusi sampah yang terlalu rendah kurang mampu menopang kebutuhan anggaran. Dalam data Bank Dunia pada April 2018 disebutkan dana yang dialokasikan pemda untuk pengelolaan sampah tergolong kecil. Besarannya hanya 2,6 persen dari total APBD, atau sekitar USD5-6 per kapita per tahun. Jumlah ini jauh berada di bawah standar internasional sebesar USD15-20 per kapita per tahun.

### Acuh pada lingkungan

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan diakui Novrizal jadi tantangan tersendiri. BPS dalam surveinya merilis Indeks Ketidakpedulian Lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satu yang diukur terkait ketidakpedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari skala 0-1, indeksnya mencapai angka 0,72. “Artinya 72 persen orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah,” sebut Novrizal. Dia meyakini, persoalan edukasi dan kultur yang ada di keluarga dan masyarakat turut memiliki andil.

Selain tidak membuang sampah sembarangan, kepedulian masyarakat

terhadap pengelolaan sampah berkaitan erat dengan proses pilah-pilih sampah sejak dari rumah. Sebagaimana diketahui, kontribusi rumah tangga sebagai penghasil sampah menempati posisi teratas. Data Adipura menyebutkan, sumber sampah rumah tangga menyumbang 36 persen, melebihi timbunan sampah dari pasar tradisional sebesar 24 persen.

Novrizal menuturkan, pada dasarnya kemasan plastik maupun kertas yang dikonsumsi rumah tangga bisa didaur ulang. Sayangnya, proses pilah pilih sampah tidak berjalan. Akibatnya, *collecting system* masih berada di angka belasan persen. “Karena kita tidak pernah memilah, maka ini semua menjadi sumber daya yang sia-sia,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Joko Tri, menurutnya jika gerakan 3R, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* berjalan di masing-masing rumah, maka jumlah sampah otomatis selesai di level hulunya. Joko menyampaikan, sampah yang mengalami pembusukan dan bau disebabkan oleh kekurangan masyarakat, “Sampah itu ketika pengambilannya, kemudian didistribusikannya tepat waktu, sampah itu tidak pernah bau,” ungkapnya.

Meski demikian, dia juga menyoroti perbaikan di sisi pengumpul, sehingga sampah rumah tangga yang telah dipilah tidak disatukan begitu saja dalam proses pengumpulan. Untuk itu, Gerakan Bank Sampah menjadi salah satu yang diharapkan bisa mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Melalui gerakan tersebut, sampah bisa menjadi sumber daya. Bukan hanya sampah berbahan plastik, melainkan juga kertas, karet, hingga logam.

### Andil industri

Pada elemen yang lebih luas, Novrizal menyinggung pentingnya peran industri. Sebagai produsen produk, sudah sepatutnya industri turut ambil bagian dalam mempertanggungjawabkan dampak produk yang telah dihasilkan bagi lingkungan. “(Jangan) mereka hanya

menciptakan produk sampai di konsumsi saja. Padahal yang menjadi persoalan salah satunya adalah *after consumption* atau *post consumer*. Setelah dikonsumsi itu akan menjadi persoalan baru” ungkap Novrizal.

Tidak kalah penting, Novrizal mempermasalahkan impor kertas bekas sebagai bahan baku industri. Dia mengungkapkan, pemerintah tengah memikirkan kemungkinan pemberian insentif bagi industri yang menggunakan barang daur ulang sebagai bahan baku. Melalui insentif ini, industri daur ulang diharapkan bisa memiliki daya tarik lebih, guna bersaing dengan industri luar.

Panjangnya rantai daur ulang menjadi sebab mahalnya harga bahan baku kertas daur ulang dalam negeri. Untuk setiap ton, harganya mencapai Rp2-3 juta. Sementara bahan baku kertas bekas impor hanya berkisar USD30 per ton. “Mengapa murah? Karena mereka (negara pengimpor) sekalian membuang sampah dan *political dumping*,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada 2019 pemerintah mengembalikan 13 kontainer yang berisi sampah kertas terkontaminasi plastik serta bahan berbahaya dan beracun kepada Amerika dan Australia. Sejumlah kontainer tersebut diimpor oleh perusahaan kertas di Indonesia. Selain perlunya memberlakukan tarif *barrier*, kebijakan *pacing down* bagi industri yang mengimpor bahan baku kertas dari luar negeri dinilai Novrizal perlu diberikan.

### Saatnya bergerak

Tidak dapat dipungkiri kuantitas sampah kian hari terus meningkat. Data Bank Dunia pada 2012 menunjukkan, Indonesia menghasilkan 85 ribu ton sampah setiap harinya. Jumlah



Dampak turunan dari mikroplastik akan berpindah pada anak cucu di masa mendatang

Foto Anas Nur Huda

ini diperkirakan terus naik hingga 150 ribu ton per hari pada 2025. Dari sampah yang dihasilkan tersebut, timbunan sampah di Indonesia pada 2016 diketahui mencapai 65,2 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, komposisi sampah plastik berkontribusi sebesar 16 persen, atau sekitar 10 juta ton. Novrizal menyebutkan, bercermin pada kenyataan bahwa pengelolaan sampah yang benar baru mencapai 32 persen, maka 68 persen sampah plastik masuk ke lingkungan. Selama itu pula, sampah plastik menjadi persoalan.

Senada dengan hal tersebut, Nadia Mulya, selebriti yang juga menaruh perhatian pada lingkungan mengungkapkan, meski terkesan sepele, sampah plastik menghasilkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. “Misalnya saja hasil investigasi dari State University of New York yang didukung Orb Media, yang menemukan adanya mikroplastik pada sampel air minum kemasan yang beredar di Jakarta, Medan, dan Denpasar. Dampak turunan dari mikroplastik ini tidak dapat saya bayangkan akan berpindah pada anak cucu saya di masa mendatang,” gelisahnya.

Atas alasan itu pula, Nadia membuat petisi guna mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan cukai kantong plastik. Dia menilai, masyarakat telah

siap berubah dan mengambil tanggung jawab dalam pengendalian lingkungan. “Saya berpikir, instrumen kebijakan pada skala yang luas, tentu akan mampu menghasilkan dampak yang lebih luas juga. Cukai menjadi satu opsi kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai perbaikan yang diharapkan tersebut,” ungkapnya.

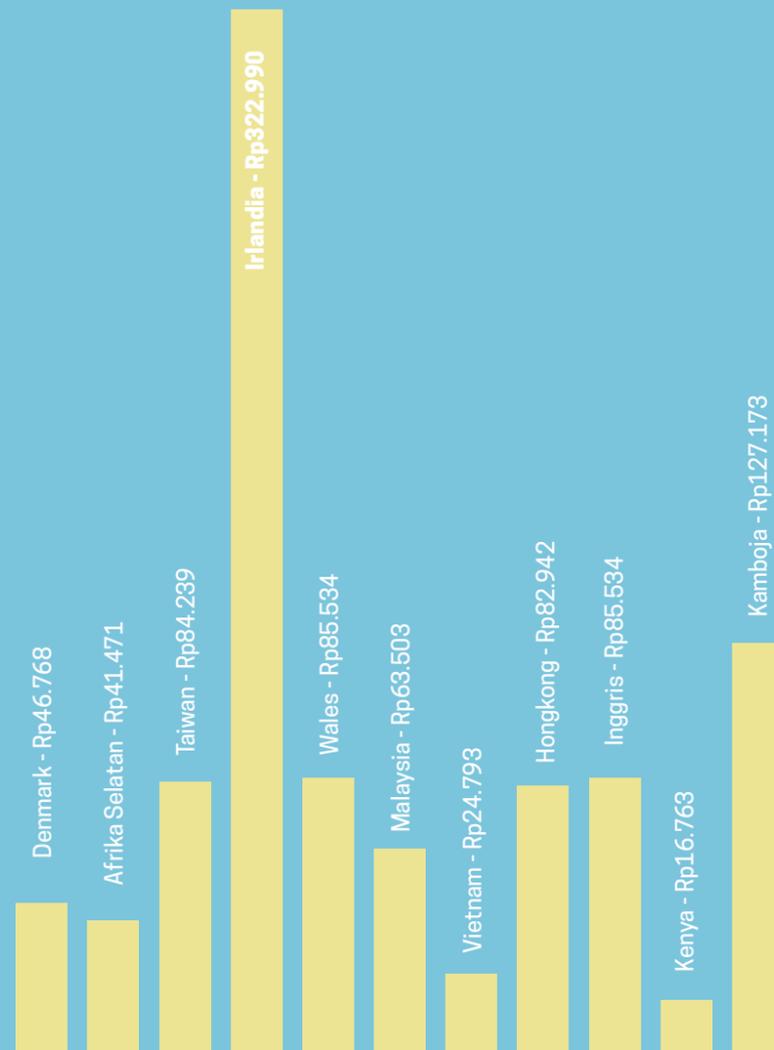
Diakui Nadia, saat ini tidak kurang dari 1,1 juta orang menandatangani petisi yang dia inisiasi tersebut. “Saya pikir ini termasuk petisi *online* dengan penanda tangan terbanyak di Indonesia,” ungkapnya. Dia berharap, hal ini menjadi kekuatan dukungan bagi Kementerian Keuangan serta DPR RI untuk segera meloloskan kebijakan cukai kantong plastik.

Teks Farida Rosadi

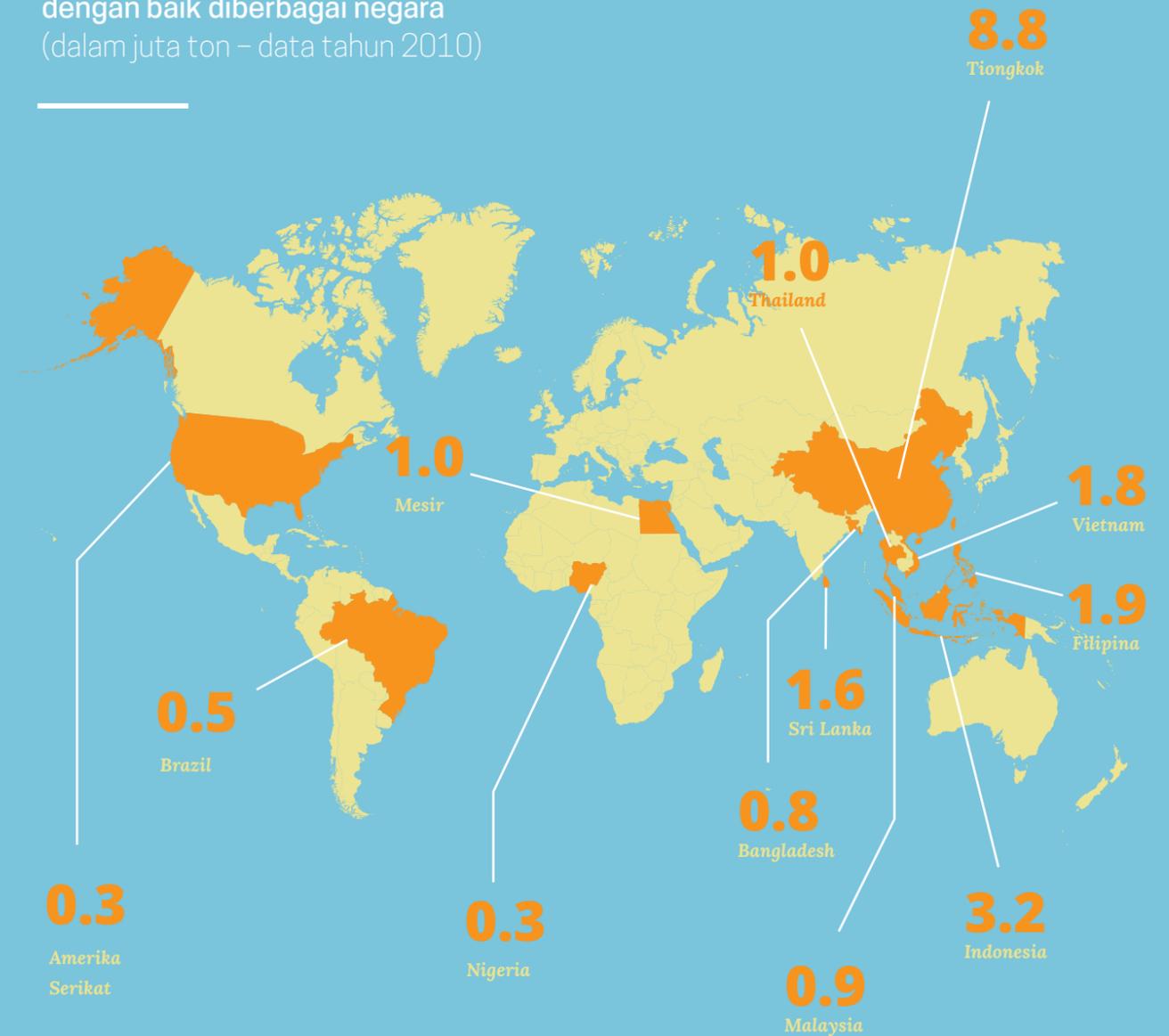
# Pengenaan Cukai Plastik

Saat ini, sampah plastik di Indonesia bisa disebut sebagai darurat karena Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke-2 di dunia. Langkah-langkah pemerintah mengurangi sampah plastik sebelumnya telah dituangkan dalam Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang cukai plastik sedang disiapkan dalam rangka mengendalikan peredaran sampah plastik.

## Pengenaan cukai kantong plastik di beberapa negara:



## Perbandingan data sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik diberbagai negara (dalam juta ton – data tahun 2010)



## Keberadaan Plastik di Laut:

- 8 juta ton plastik berakhir di laut setiap tahun
- 22% lumba-lumba dan paus memakan plastik
- 100% ilmuwan menemukan sampah plastik di setiap habitat pantai di mana kura-kura diteliti
- 90% burung laut terdapat plastik di perutnya
- 1 dari 3 ikan laut terpapar sampah plastik

Sumber: G Adventures, Ocean Conservancy, Plastic Oceans

# PILIHAN TEPAT LAGI MODERAT



Daur ulang merupakan rantai dalam *circular economy*.

Foto Resha Aditya

**K**epraktisan kantong plastik telah memanjakan kita selama ini. Ringan, mudah ditemui, murah, bahkan nyaris selalu diperoleh secara gratis. Kehadirannya erat dengan aktivitas keseharian kita: saat belanja di pasar tradisional, kantin, atau retail modern. Ketersediaannya seakan-akan kebutuhan utama di tengah masyarakat. Padahal, sering kali ia kemudian berakhir menjadi sampah yang sulit terurai hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Tanpa disadari, lama-kelamaan sampah kantong plastik terus

menumpuk, lalu menjelma sebagai ancaman besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, wacana pengenaan cukai terhadap kantong plastik kemudian dikumandangkan. Cukai kantong plastik diharapkan menjadi pilihan tepat dan moderat. Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengonsultasikannya kepada DPR pada awal Juli 2019.

## Pemungutan di produsen atau importir

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan penggunaan kantong plastik per menit mencapai lebih dari satu juta lembar. Sekitar 50 persen dari kantong tersebut hanya dipakai sekali, lalu menjadi sampah. Akibatnya, jumlah timbunan sampah kantong plastik terus naik signifikan. “Kurang lebih 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun. Hampir 95 persennya menjadi sampah lantaran nilai ekonominya sangat rendah sehingga tidak menjadi pilihan untuk didaur ulang,” jelas Heru.

Dalam rencana kebijakan yang telah disusun, Heru membeberkan, pemungutan cukai kantong plastik akan dilakukan di tingkat produsen (industri) atau importir, bukan di tingkat pengecer sebagaimana yang sudah diterapkan dalam kebijakan kantong plastik berbayar. “Hal ini dimaksudkan agar teknis administrasi pemungutan dan pengawasannya relatif lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, tujuan pengenaan cukai atas kantong plastik ini dapat tercapai secara efektif atau *ease of administration*,” terang Heru. Kemudahan lain dalam rencana kebijakan cukai kantong plastik ialah pembayaran cukai oleh pabrik dapat menggunakan mekanisme pembayaran berkala. Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang pengenaan cukai pada kantong plastik rencananya akan diajukan kepada Presiden segera setelah pokok-pokok kebijakan cukai kantong plastik mendapat persetujuan DPR.

Rencana pengenaan cukai kantong plastik dinilai tepat oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Selain menambah penerimaan negara, cukai tersebut akan menjadi disinsentif penggunaan kantong plastik. Pemerintah dapat mengendalikan sampah kantong plastik di tingkat invidual. “Hal ini cocok pada negara yang memiliki *waste management* yang masih buruk seperti Indonesia. Praktik di berbagai negara memiliki pola demikian. Pengenaan cukai atas plastik diimplementasikan pada negara yang memiliki *waste management* buruk seperti Afrika sehingga dibutuhkan pengendalian di tingkat konsumen,” jelas Yustinus. Hal penting yang perlu diperhatikan, Yustinus menggarisbawahi, adalah administrasi pemungutan harus efektif. “Pengenaan cukai atas kantong plastik paling efektif dikenakan di level *supplier* biji plastik atau bahan baku karena akan mencegah perbedaan pengenaan cukai di pabrikan besar dan kecil,” ujarnya.

Ditemui Media Keuangan dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan turut mendukung usulan pengenaan cukai plastik dari pemerintah. “Kami memberikan dukungan, tetapi pemerintah harus memberikan konsep yang lebih mendasar. Di titik mana cukai itu akan dikenakan? Lalu, bagaimana cara penyetorannya ke kas negara?” tanyanya. Walakin, ia berharap nantinya cukai tidak hanya dikenakan kepada kantong plastik, tetapi kepada objek plastik yang lebih komprehensif. Lebih

lanjut, Misbakhun meminta pemerintah menyiapkan terlebih dahulu bagaimana pola pengawasan, penarifan, ekspektasi penerimaan negara, dan pengelolaan cukai kantong plastik sebagai bagian dari APBN.

## Kedepankan *circular economy*

Minimalisasi penggunaan kantong plastik telah lama diterapkan Joko Tri Haryanto, seorang pemerhati lingkungan sekaligus Peneliti Madya Badan kebijakan Fiskal. Misalnya tatkala berbelanja di retail modern, jika sedang tidak membawa tas sendiri, ia lebih memilih kardus untuk mawadahi barang yang dibeli. Joko menyadari sinyalemen bahaya sampah plastik memang nyata, bukan persepsi atau bualan. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berinisiatif untuk membuat regulasi pelarangan peredaran kantong plastik di retail modern guna menekan sampah plastik, diantaranya Pemkot Bogor, Denpasar, Samarinda, dan Balikpapan.

“Mereka tidak menyediakan kantong plastik. Akibatnya, industri plastik pasti terpukul. Maka, sebetulnya cukai ini adalah *deal* yang paling optimal. Industri plastik tetap bisa memproduksi, tetapi konsumen dibangkitkan *awareness*-nya,” kata Joko. Dengan demikian, industri plastik akan terdorong untuk menghasilkan plastik *biodegradable*, yakni produk plastik yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Wacana penerapan cukai plastik, ungkap Joko, bukan hal yang baru-baru ini saja muncul. Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan pernah mengonsultasikan kepada DPR mengenai wacana penerapan cukai botol plastik dan kemasan plastik. Namun, kerentanan dari berbagai pihak, terutama penolakan dari asosiasi industri terkait, membuat wacana itu urung terlaksana. Joko bertutur, “Ketika ingin membuat kebijakan, pemerintah harus melihat *multilevel perception*-nya. Bagaimana persepsi kalangan industri, asosiasi, masyarakat, juga dari kementerian teknis terkait.”

Pada tahun 2019, arah usulan pengenaan cukai plastik bergeser, tak lagi fokus ke botol plastik, tetapi mengarah ke kantong plastik. Cukai dikenakan ke kantong plastik guna mengendalikan konsumsinya yang mempunyai eksternalitas/dampak negatif bagi kesehatan, masyarakat, dan lingkungan. Sementara itu, faktanya saat ini botol plastik sudah banyak dipungut dan didaur ulang. Meskipun ada klaim bahwa kantong plastik juga bisa didaur ulang, Joko menilai persentasenya sangat kecil.

Untuk mengatasi persoalan sampah plastik,

Joko mengedepankan pentingnya konsep *circular economy*, yakni suatu sistem yang membangun dengan memanfaatkan kembali apa yang telah digunakan di awal. Menurutnya, proses produksi dan konsumsi selalu menimbulkan konsekuensi sampah. Dengan konsep *circular economy*, sampah yang dilahirkan baik oleh produsen dan konsumen akan dipakai lagi dengan memasukkannya ke dalam prosesnya lagi. Konsep *circular economy* ini sudah berjalan pada proses daur ulang botol plastik yang jamak dilakukan saat ini.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar mengungkapkan hal senada. Menurutnya, terdapat tiga pendekatan besar dalam pengelolaan sampah. Pertama, minim sampah. Kedua, *circular economy*. Dan ketiga, pelayanan dan pendekatan teknologi. “Pada prinsipnya, persoalan sampah bisa diselesaikan tanpa harus mengurangi pertumbuhan industrinya, tetapi bagaimana semaksimal mungkin sampahnya bisa menjadi bahan baku lagi,” jelas Novrizal.

#### Perubahan perilaku

Dalam penyampaian rencana pengenaan cukai kantong plastik di depan DPR, pemerintah mengusulkan pengenaan tarif cukai sebesar Rp30.000 per kilogram. Dengan jumlah kantong plastik per kilogram adalah 150 lembar, maka tarif cukai per lembar akan sebesar Rp200. Sebagai pembanding di kawasan Asia Tenggara, tarif cukai kantong plastik di Malaysia mencapai Rp63.503 per kilogram, sedangkan di Kamboja menyentuh angka Rp127.123 per kilogram.

“Dalam pokok-pokok kebijakan pengenaan cukai terhadap kantong plastik, pemerintah mengusulkan skema pembedaan tarif cukai atas kantong plastik ramah lingkungan,” ungkap Heru Pambudi. Direncanakan, kantong plastik ramah lingkungan akan dibebankan tarif cukai lebih rendah dibandingkan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Dampak bagi industri akan bergantung dari rancangan desain kebijakan seperti besaran dan struktur tarif yang akan diimplementasikan. Yustinus menilai pengenaan tarif cukai yang lebih rendah bagi kantong plastik ramah lingkungan merupakan langkah tepat. Struktur tarif tersebut mampu mengurangi eksternalitas negatif, tetapi pada saat yang sama menjadi solusi bagi industri. Namun, lanjutnya, struktur

tarif tersebut akan memberikan tantangan lebih bagi administrasi cukai.

Menyinggung perihal rencana pembedaan tarif terhadap plastik ramah lingkungan, Novrizal Tahar mengatakan saat ini sedang dilakukan riviui terhadap Standar Nasional Indonesia plastik ramah lingkungan. Tatkala SNI tersebut dikeluarkan pada tahun 2016, belum banyak pertimbangan dan kabar terkini terkait isu plastik mikro. Menurutnya, riviui dengan melihat berbagai perkembangan di dunia internasional akan menjadi kuncinya. Namun, Novrizal menegaskan esensi dari pengenaan cukai plastik bukanlah pada pembedaan tarif. “Sebenarnya yang lebih esensial ialah bagaimana mengurangi sampah plastik itu sendiri,” pungkasnya.

Pandangan serupa disampaikan Joko Tri Haryanto yang berpendapat pengenaan cukai kantong plastik merupakan manajemen perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. “Permasalahannya bukan nominalnya, bukan tarifnya, melainkan *magnitude* dari perubahan *behaviour*-nya. Jadi, pengenaan cukai ini akan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang positif,” tuturnya. Meski pengenaan cukai awalnya berbentuk paksaan, menurut Joko, lama-lama masyarakat akan terbiasa tidak menggunakan plastik.

Satya Hangga, Co-Founder dan Penasihat Indonesian Energy and Environmental Institute (IEEI), sekaligus Ketua Bidang ESDM Rumah Millennials turut menyoroti pentingnya perubahan perilaku

masyarakat dalam menyikapi isu sampah plastik. Diakui Satya, IEEI saat ini gencar melaksanakan gerakan tanpa plastik. “*Zero plastic* telah menjadi salah satu tujuan kami mengingat bahwa World Economic Forum dan Ellen Mac Arthur Foundation pada 2016 lalu memprediksi bahwa di tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik ketimbang ikan, berdasarkan berat,” ungkap Satya.

#### Usulan bentuk insentif

Pengenaan tarif cukai yang lebih rendah terhadap produk kantong plastik ramah lingkungan dimaksudkan sebagai bentuk insentif bagi produsen. Untuk industri ramah lingkungan yang melakukan penanaman modal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berencana memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk importasi mesin dan bahan baku. Sementara itu, Joko Tri Haryanto mengusulkan pemberian insentif perpajakan atau pemberian subsidi kepada industri yang melakukan daur ulang plastik.

Tak jauh berbeda, Mukhamad Misbakhun berpendapat insentif perlu diberikan kepada produk-produk yang memelihara kelestarian lingkungan. Pekerjaan daur ulang sampah plastik merupakan pekerjaan yang rumit dan sepi peminat, tetapi pemerintah belum memberikan perlakuan khusus kepada mereka. “Misalnya ada industri yang melakukan daur ulang terhadap plastik, seharusnya mereka diberikan insentif,” tutupnya.

Teks Reni Saptati D.I



## ALIHKAN KEBIASAAN DEMI LINGKUNGAN

**K**ata plastik, menurut *The Plastic Historical Society*, berasal dari bahasa Yunani *plasticos*. Kata ini merupakan kata sifat yang punya makna “dapat dibentuk” atau “dapat dicetak dengan dipanaskan”. Semula plastik diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas unsur yang ringan, murah, kuat, dan tahan lama. Penelitian mengenai unsur yang diinginkan itu terus menggeliat. Secara berangsur, penelitian mengenai plastik terus mengalami pemutakhiran. Kualitas plastik yang ada juga terus ditingkatkan. Pada periode 1900-an, teknologi plastik mulai berkembang pesat dan ramai digunakan



“Kantong plastik itu adalah pencemar plastik yang paling besar ditemukan di sungai-sungai di kota-kota besar di Indonesia”

**Tiza Mafira**  
Founder Diet Kantong Plastik

oleh masyarakat hingga hari ini.

Plastik telah menjadi bagian yang nyaris tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, plastik digunakan dalam berbagai sektor. Kebutuhan rumah tangga, perabot elektronik, pun kemasan makanan dan minuman menggunakan plastik sebagai bahan utamanya. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini, belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi. Mulai dari tanah, sungai, bahkan lautan.

#### Ancaman Pencemaran Lingkungan

Secara global, sampah plastik yang terapung di permukaan laut pada 2013, menurut *Our World In Data*, telah lebih dari 250 ribu ton.

Tingginya volume sampah plastik ini tentu berdampak tak elok bagi lingkungan hidup. Lingkungan yang buruk, cepat atau lambat akan berdampak pula pada kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Isu pencemaran lingkungan ini telah menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai kalangan masyarakat ramai-ramai menyuarakan kerisauan atas kondisi sampah plastik. Berbagai komunitas menggiatkan kampanye pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kalangan industri pun turut ambil bagian. Demikian pula pemerintah. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berupaya untuk mengurangi produksi sampah plastik. Salah satu bentuk upaya memupus kerisauan ini adalah melalui cukai plastik.

Tiza Mafira, melalui Diet Kantong Plastik, turut ambil bagian menyelamatkan lingkungan dari ancaman pencemaran akibat sampah plastik. “Kantong plastik itu adalah pencemar plastik yang paling besar ditemukan di sungai-sungai di kota-kota besar di Indonesia,” ia melanjutkan, “Dia juga adalah barang yang tidak esensial, begitu. Sehingga kalau kita hilangkan dari kehidupan kita, sebenarnya tidak terlalu masalah.” Tiza mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan produk pengganti kantong plastik. Ia sangat mendorong penggunaan kantong belanja yang dapat dipakai ulang. “Itu hanya membutuhkan kebiasaan saja, kebiasaan untuk selalu membawanya ketika berbelanja,” katanya.

Bagi sebagian kalangan, perubahan kebiasaan memang bukan perkara sepele. Kenyamanan

yang terbangun akibat terlalu lama menggunakan produk plastik bisa saja menjadi alasan untuk enggan beralih. Menyasati hal itu, Raden Arthur Ario Lelono, Kepala Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan penggunaan produk bioplastik. Produk bioplastik ini secara penampilan tidak begitu berbeda dengan plastik konvensional. Pun, bioplastik tidak akan mencemari lingkungan karena mudah terurai. Raden Arthur mengatakan, “Bioplastik itu banyak, ada yang berbasis singkong.” Ia melanjutkan, “ada yang kami kembangkan di sini adalah plastik yang berbasis limbah tandan kosong kelapa sawit.” Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya semua materi yang masih mengandung selulosa berpotensi untuk dijadikan plastik.

Berbeda dengan plastik yang dikembangkan dari singkong, bioplastik dari limbah tandan kosong kelapa sawit ini diklaim lebih kuat dan tahan air. Bioplastik ini juga diproyeksikan untuk dapat menggantikan plastik konvensional yang umum digunakan saat ini. Kendati demikian, Arthur mengatakan untuk saat ini produk bioplastik dari limbah tandan kosong kelapa sawit belum dapat diproduksi secara massal. Menurutnya, ongkos produksi bioplastik jenis ini bisa mencapai dua sampai tiga kali lipat dari ongkos produksi plastik konvensional.

#### Komitmen Lintas Sektor

Ragam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan akibat plastik ini tentu bukan kerja satu pihak saja. Untuk dapat mewujudkan mimpi bersama ini diperlukan komitmen dari seluruh lapisan, baik masyarakat, pemerintah, akademisi, dan maupun pelaku industri.

Raden Arthur mengatakan, “Memang ini tidak hanya kerja satu sektor ya.” Selain itu ia juga berharap penelitian yang bersifat *green technology* dapat diintensifkan. Senada dengan Arthur, Tiza dari Diet Kantong Plastik juga beranggapan bahwa upaya selamat dari ancaman pencemaran lingkungan ini perlu komitmen dari berbagai pihak. “Nggak bisa kalau tunggu-tungguan,” ia melanjutkan, “Ini adalah tanggung jawab kita semua.”

Teks A. Wirananda



## CUKAI PLASTIK UNTUK LINGKUNGAN LEBIH BAIK

Heru Pambudi,  
Direktur  
Jenderal Bea  
dan Cukai

Foto  
Anas Nur  
Huda

Rencana penerapan kebijakan cukai kantong plastik tinggal menunggu waktu. Isu lingkungan menjadi alasan kuat yang melatarbelakangi rencana kebijakan ini. Lalu seperti apa target pemerintah terkait kebijakan ini? Simak wawancara Media Keuangan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi berikut.

#### Mengapa instrumen cukai menjadi pilihan pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan khususnya sampah kantong plastik?

Cukai menjadi alat fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang mempunyai eksternalitas atau berdampak negatif bagi kesehatan, masyarakat, maupun lingkungan. Sebagaimana pasal 2 ayat 1 UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai, disebutkan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak

negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengendalian dengan mekanisme cukai dianggap lebih tepat diterapkan. Mengapa? Karena besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter barangnya. Selain itu, cukai dinilai efektif untuk mengendalikan barang (kantong plastik) karena terdapat kewenangan untuk melakukan kontrol fisik atas barang tersebut.

#### **Bagaimana perkembangan terkait pembahasan kebijakan cukai kantong plastik saat ini?**

Saat ini, perumusan kebijakan sudah dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) oleh anggota Panitia Antar Kementerian (PAK). Anggota PAK tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian terkait lainnya. Kebijakan ini juga sudah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR-RI di awal bulan Juli tahun ini.

Selain itu, di luar tim PAK, diskusi-diskusi mengenai permasalahan yang terkait dengan kebijakan juga dilakukan. Sebagai contoh, minggu lalu Kementerian Perindustrian mengadakan FGD dengan para pelaku industri plastik, akademisi, dan LSM. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga pernah berdiskusi dengan Badan Standardisasi Nasional. Upaya-upaya tadi, selain merupakan prosedur standar, juga sebagai langkah memitigasi risiko-risiko yang akan muncul di kemudian hari, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab persoalan yang ada.

#### **Kapan Peraturan Pemerintah terkait cukai kantong plastik ini ditargetkan untuk diterbitkan?**

Target jangka pendek selanjutnya adalah finalisasi RPP melalui rapat PAK. Selanjutnya, kami meminta persetujuan Presiden untuk menandatangani RPP tersebut. Setelah itu, dilakukan penyusunan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan teknis lainnya, mulai dari perizinan, penarifan, hingga yang terkait pelunasan cukainya. RPP akan diajukan kepada Presiden segera setelah pokok-pokok kebijakan cukai kantong plastik mendapat persetujuan DPR. Ditargetkan tahun ini RPP sudah ditandatangani oleh Presiden.

#### **Apa saja peruntukan dana yang diperoleh dari cukai (dana *earmarking*) kantong plastik nantinya?**

Inilah salah satu keunikan cukai dibandingkan pungutan negara lainnya, yaitu penerimaan yang diperoleh dari cukai dapat dialokasikan dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh yang saat ini sudah berjalan adalah penerimaan cukai hasil tembakau. Sebagian dana penerimaan cukai tembakau dialokasikan ke daerah berupa dana bagi hasil cukai (DBH). Dana ini dapat digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Demikian pula nantinya dengan cukai kantong plastik. Pemerintah berencana mengalokasikan dana dari penerimaan cukai kantong plastik untuk program-program yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup.

#### **Bagaimana respons industri terhadap rencana kebijakan ini?**

Setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari para pemangku kepentingan, terutama pihak yang secara langsung akan terdampak, antara lain para pelaku industri. Sejauh ini, pemerintah sudah menampung banyak aspirasi dari para pelaku industri kantong plastik mengenai rencana kebijakan cukai kantong plastik.

Alasan atau pertimbangan dari para pihak yang mendukung kebijakan ini antara lain adanya kesadaran bahwa sudah semestinya barang-barang yang diproduksi atau dikonsumsi lebih mudah diterima oleh bumi (ramah lingkungan) sehingga kantong plastik yang tidak ramah lingkungan seharusnya mulai dikendalikan. Selain itu, cukai dipandang sebagai jalan

tengah antara tidak dikendalikan sama sekali atau dilarang sama sekali. Seperti halnya kebijakan beberapa pemerintah daerah yang menetapkan larangan penggunaan kantong plastik. Kebijakan larangan sudah pasti akan mematikan industri kantong plastik. Sementara dengan peneanaan cukai, industri masih boleh berproduksi atau masyarakat masih boleh menggunakan kantong plastik dengan syarat ada pembebanan pungutan. Adapun alasan atau pertimbangan dari para pihak yang menolak antara lain kekhawatiran akan terganggunya iklim industri dan investasi di sektor kantong plastik khususnya yang efek lanjutannya adalah masalah keberlangsungan industri dan ketenagakerjaan.

#### **Apa harapan yang ingin dicapai melalui penerapan cukai kantong plastik?**

Dengan peneanaan cukai kantong plastik, maka penggunaan kantong plastik akan lebih terkendali. Konsumen akan terdorong untuk tidak mudah menggunakan kantong plastik dan membuangnya. Selain itu, jika penggunaan kantong tidak dapat dihindari maka konsumen mempunyai alternatif untuk menggunakan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan kantong yang bukan sekali pakai, baik dari bahan plastik maupun bukan plastik. Oleh karena itu, dalam jangka panjang industri akan terdorong untuk memproduksi kantong yang lebih ramah lingkungan atau menemukan teknologi baru yang mendukung konsep ramah lingkungan.

Teks Farida Rosadi

Trivia

# Tahukah kamu?



Sistem kepabeanan dan cukai modern dimulai pada 1 Oktober 1620 oleh Jan Pieterzoon Coen.



Pada awal pembentukan organisasi Kementerian Keuangan, urusan bea dan cukai ditetapkan sebagai bagian dari Pejabatan Pajak.



Pada 1 Oktober 1946, Sjafrudin Prawiranegara melakukan perombakan organisasi. Urusan bea dan cukai lepas dari Pejabatan Pajak dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Organisasi ini pertama dipimpin oleh R.A Kartadjoemena.

Foto Perpusnas

# Kian Agresif Menembus Pasar

Suasana kegiatan ekspor impor di pelabuhan

Foto  
Anas Nur Huda.



Cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 1999 dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia. Satu dasawarsa kemudian, identitasnya berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009. Institusi yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia ini turut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia disegani di tataran global. Salah satu upayanya ialah meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang berdaya saing. Simak perbincangan Media Keuangan dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly seputar peran LPEI dalam mendorong ekspor nasional.

## Bagaimana peran LPEI dalam mendukung kemajuan kinerja ekspor nasional?

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) pemerintah, kami punya mandat khusus untuk mendukung peningkatan ekspor melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Bukan hanya itu, LPEI pun diberikan penugasan khusus untuk menjalankan program-program pemerintah yang disebut dengan *National Interest Account* (NIA). Program tersebut khusus untuk *project-project* atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial, tetapi dianggap perlu untuk dilakukan oleh pemerintah.

## Apa saja yang sudah dilakukan LPEI hingga saat ini, terutama terkait mandat pembiayaan?

Sejak berdiri pada 1 September 2009 hingga akhir tahun 2018, LPEI sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp108,8 triliun. Pertumbuhannya cukup signifikan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Institusi ini memperoleh *capital*

*injection* dari pemerintah melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp7 triliun untuk penugasan utama dan Rp4,2 triliun untuk penugasan khusus. Dengan modal tersebut, LPEI telah menyalurkan pembiayaan Rp108,8 triliun kepada 923 eksportir dengan pasar tujuan ekspor lebih dari 160 negara.

Pembiayaan LPEI juga memberikan *developmental impact* yang cukup kuat. Hasil kajian dampak ekonomi dan sosial pembiayaan LPEI tahun 2018 mencatatkan adanya peningkatan PDB sebesar 2,64 kali pembiayaan atau setara Rp287 triliun, peningkatan investasi sebesar 2,81 kali pembiayaan atau setara Rp306 triliun, peningkatan ekspor sebesar 3,52 kali pembiayaan atau setara Rp383 triliun, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja hingga 56.000 orang per Rp1 miliar pembiayaan atau setara 6.098.175 orang.

Insyaallah investasi pemerintah kepada LPEI terlaksana dengan baik. Meskipun memang jika kita bicara konteks ekspor nasional, masih banyak yang harus kami lakukan. Indonesia suatu negara besar, *economy size*-nya lebih dari Rp1.000 triliun, penduduk 260 juta, tetapi ekspor kita hanya sekitar 185 miliar dolar, jauh lebih kecil dibandingkan Vietnam. Jadi, tantangan atau tuntutan kepada kami tentu masih akan terus meningkat.

## Bagaimana dengan pencapaian pada mandat utama LPEI lainnya?

Pertumbuhan bisnis asuransi dan penjaminan sampai akhir tahun 2018 masing-masing sebesar Rp11 triliun hingga Rp12 triliun, atau total sekitar Rp20-an triliun. Nah, untuk jasa konsultasi, LPEI baru memulainya pada tahun 2015. Namun, sudah lebih dari 1500 UKM berbasis ekspor yang diberikan pelatihan. Kami berharap mereka mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor yang berdaya saing. Pelatihan dasar telah

diikuti sekitar 1500 peserta, sedangkan pelatihan *skilling up* supaya bisa menjadi eksportir diikuti hampir 500 peserta. Dengan perkembangan teknologi, kami juga melakukan program pendampingan untuk UKM agar mereka dapat masuk ke pasar *global marketplace* serta *e-commerce global*, seperti Amazon, eBay, dan Alibaba.

## Apa saja bentuk penugasan khusus yang diberikan kepada LPEI?

Kami mendapatkan beberapa penugasan khusus sejak tahun 2015. Pada tahun itu, LPEI memberikan dukungan pembiayaan ekspor kepada industri strategis gerbong kereta PT INKA (Industri Kereta Api) ke Bangladesh. Dua tahun kemudian Bangladesh melakukan *repeat order*. Ini menunjukkan pasar yang tadinya belum mengenal produk Indonesia dan belum tahu Indonesia punya produsen kereta api, kini sudah mulai tahu. Terbukti bahwa program pemerintah bisa mendorong industri strategis untuk berkembang. Dukungan pembiayaan dalam rangka penugasan khusus ekspor juga kami berikan kepada PT DI (Dirgantara Indonesia). Selain itu, bantuan ketahanan usaha juga pernah disalurkan kepada industri furnitur dan tekstil.

Saat ini yang menjadi tema ekspor nasional adalah bagaimana meningkatkan ekspor melalui pemberian dukungan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia serta bagaimana cara eksportir Indonesia masuk ke pasar nontradisional. Untuk itulah, kami sekarang mengelola Rp1,6 triliun agar para eksportir nasional dapat masuk ke pasar nontradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

## Seperti apa bentuk kerja sama LPEI dengan instansi lain?

Kami cukup gencar melakukan kolaborasi dengan kementerian/ lembaga, asosiasi, pelaku usaha, dan

Sinthya Roesly,  
Direktur LPEI

Foto  
Cahyo Afif



institusi keuangan, baik bank maupun yang non-bank. Sesuai arahan Menteri Keuangan, kami juga bersinergi dengan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan. Tema penguatan jejaring atau *network* ini memang kami yakini menjadi kata kunci untuk mendorong percepatan ekspor.

Dalam konstruksi jejaring ini, kami memfasilitasi keberadaan Kantor Bersama Ekspor Indonesia (KBEI), yakni wadah kerja bersama antara kementerian/lembaga yang dipimpin Kemenko Perekonomian yang bertempat di gedung LPEI lantai 1. Di sana terdapat *National Export Dashboard (NED)*, yaitu *database* dan pusat informasi seputar ekspor dan kajian ekspor. Sejalan dengan itu, LPEI membangun jaringan dengan perguruan tinggi nasional dalam UNIED (University Network for Indonesia Export Development). Di level internasional, kami tergabung dalam forum-forum internasional misalnya Asian Exim Bank Forum. LPEI juga aktif di *global network for exim bank* dan *finance institution*.

#### Seperti apa kontribusi UNIED bagi LPEI?

UNIED merupakan jejaring perguruan tinggi di Indonesia yang memberi perhatian terhadap pengembangan kebijakan, riset, dan pembelajaran bidang ekspor. Melalui UNIED, LPEI berkolaborasi dengan sebelas PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dari seluruh nusantara. Pada tahun 2018, UNIED berhasil menerbitkan 20 kajian. Tahun ini Menteri Keuangan juga meluncurkan kajian *export outlook* untuk 10 komoditas dan *supply chain* untuk 5 komoditas unggulan Indonesia. Menteri Keuangan meminta kami mulai membangun *research capacity* yang hasil kajiannya nanti bisa digunakan untuk membentuk *policy*.

#### Apa saja tantangan yang dihadapi LPEI selama ini?

Ekspor kita perlu lebih banyak promosi dan perlu lebih proaktif masuk ke pasar-pasar. Kami juga perlu menghadapi *trade barrier* berupa tarif bea masuk oleh bank di negara itu. Untuk itu, perlu dibangun PTA (*Preferential Trade Agreement*) dan FTA (*Free Trade Agreement*) dengan negara tujuan. Untuk dalam negeri, masalah perizinan masih menjadi tantangan. Dukungan-dukungan dalam bentuk fasilitasi *regulatory*, fiskal, dan lainnya terasa masih kurang terintegrasi.

#### Ke depannya, apa saja rencana LPEI untuk mengoptimalkan perannya dalam memajukan ekspor Indonesia?

Kami fokus untuk lebih agresif menembus pasar. Dari sisi internal, kami memperkuat kapasitas kelembagaan sehingga ke depannya bisa berperan sebagai *true eximbank* dan *true policy bank*. Saat ini *platform balance sheet* kami relatif cukup kuat dan besar. Dari awalnya hanya memiliki size Rp4 triliun, sekarang kami sudah punya Rp120 triliun. Aset

tersebut jika dibandingkan dengan total ekspor nasional hanya 5 persen. Sebagai perbandingan, penduduk Turki berjumlah 70-an juta, size ekonomi mereka hampir sama dengan Indonesia. Namun, *support* pembiayaan atau aset Turkish Eximbank terhadap total ekspornya sudah mencapai 15 persen.

PR utama kami ke depan setidaknya ada tiga. Pertama, kami perlu mendorong integrasi, konsolidasi, dan sinergi dari ekosistem ekspor untuk mendorong ekspor nasional. Kedua, kami harus membangun *database* ekspor nasional yang hasil analisisnya dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah ataupun inisiatif kebijakan sesuai kebutuhan. Ketiga, kita perlu memiliki *export strategy* yang disusun tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah dan panjang guna menyikapi kondisi perdagangan global. Jadi, itulah tiga *building blocks* yang cukup penting untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Teks Reni Saptati D.I



# LANTANGKAN SUARAMU!

📧 [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id)

📱 Whatsapp/SMS 0815 99 6666 2

📠 Fax (021) 3523252

☎️ Telepon (021) 3454236

🌐 <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

# Menjalani Peran Ganda dalam Harmoni

**RIA SARTIKA AZAHARI**

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD),  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Foto  
Anas Nur Huda

**M**ata Ria Sartika Azahari menerawang mengingat momen saat ia masih bekerja di Biro Analisa Keuangan Daerah pada Badan Analisa Keuangan & Moneter (sekarang BKF). Saat itu, pekerjaan cukup menyita waktunya dengan absensi yang sangat ketat sedangkan ia baru saja dikaruniai seorang bayi. Keresahan menyelimuti dirinya sebab ia harus meninggalkan bayinya hanya bersama *baby sitter* di rumah.

“Jadi setelah dua tahun saya bekerja, saya sudah hampir memutuskan untuk keluar. Namun suami saya bilang ‘pikirkan baik-baik sebab saya lihat kamu bukan tipe rumahan, nanti jangan-jangan setelah di rumah saja malah jadi frustrasi,’” ceritanya.

Akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap bekerja dan berusaha untuk bisa menyeimbangkan peran gandanya sebagai wanita bekerja sekaligus sebagai ibu dari Satryo Wibisono dan istri dari Haryo Raharjo. Semudah itu kah? Tentu saja tidak. Perempuan lulusan Master of Art in Economics, International University of Japan ini harus berjuang sekuat tenaga untuk menyelaraskan antara pekerjaan dan urusan keluarga terutama anak. “Kadang saya terpaksa pulang cepat. Atau juga terpaksa izin kalau anak saya sakit,” kenangnya.

Memang benar kata pepatah bijak “Sehari selembat benang, lama-lama jadilah selembat kain”. Jika seseorang memiliki kesabaran dan konsisten dalam menjalani proses, hasil yang terbaik pasti akan datang. Itulah yang dirasakan oleh wanita yang pernah menjadi Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim tersebut. Sebuah kesempatan emas datang padanya. Kesempatan yang menjadi jawaban baginya untuk bisa mengembangkan diri sekaligus memiliki waktu yang lebih berkualitas dengan anak.

“Ketika anak saya balita ada tawaran sekolah dari kantor, kebetulan suami saya yang bekerja di Bappenas juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya saya *apply* agar saya bisa membawa anak saya. Saya pikir saat itu masih *golden*

*age* dia dan saya juga bisa mencurahkan perhatian dengan membawa dia sekolah dan juga berkumpul bersama suami,” ujarnya.

Komitmen terhadap perannya sebagai ibu terus ia jalankan meski harus mengorbankan promosi jabatan yang pernah ditawarkan kepadanya. “Saya mengundurkan diri karena waktu itu anak saya baru kelas 1 SD. Kami baru kembali dari Jepang. Jadi saya merasa perlu mendampingi dia di masa penyesuaian,” tuturnya.

Dengan segala dinamika kehidupannya saat itu, ia pun akhirnya berhasil menjalani kedua peran sosialnya tersebut secara harmonis. Saat ini putra semata wayangnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S-2 di London. Ketika dimintai resep keberhasilannya menjalani peran ganda untuk dibagikan kepada para ibu muda di Kementerian Keuangan, ia menjawab ada tiga penyeimbang yang perlu dipegang teguh.

“Penyeimbangnya itu adalah kompromi, komitmen, dan restu. Kompromi dengan keluarga menurut saya penting karena pada hakekatnya kita bekerja untuk keluarga. Komitmen dalam rumah tangga juga perlu dijaga dan sebagai perempuan, restu dari suami dan anak itu juga sangat penting. Saya selalu berdiskusi dengan suami dan anak sebelum mengambil keputusan,” ceritanya.

Sosok perempuan yang meyakini satu prinsip yakni ‘menjadi orang penting itu baik tapi lebih penting menjadi orang baik’ ini, dapat menjadi panutan bagi para ibu muda yang bekerja di Kementerian Keuangan. Beliau membuktikan bahwa ia masih bisa berkarya di kantor dengan tetap berusaha optimal menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu.

## Orang tua menjadi inspirasi kehidupan

Prioritasnya terhadap keluarga merupakan salah satu hasil didikan orang tuanya yang selalu menanamkan kebersamaan dalam keluarga. Putri bungsu dari sepuluh bersaudara ini selalu ingat ajaran ayahnya alm. Kol. (Purn) Azahari dan ibunya almh. Hasimah agar yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua.

“Jadi kalau dulu semisal ada salah satu dari kami yang sakit, yang lain nggak akan boleh jalan-jalan atau bersenang-senang. Kita diajarkan untuk berempati antar saudara. Waktu ujian juga begitu, kalau ada saudara yang sedang ujian, saudara lainnya tidak boleh mengganggu belajarnya,” kenangnya.

Selain empati, ada dua nilai lainnya yang ditanamkan kedua orang tuanya sejak ia kecil yakni saling menghargai dan menjaga nama baik.

“Kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai. Jangan meremehkan orang lain siapapun itu baik orang yang ada di bawah kita maupun anak kecil sekalipun. Kita tidak akan pernah tahu nantinya mereka akan jadi apa. Siapa tahu lebih hebat dari kita. Ibu saya juga selalu menasehati saya agar menjaga nama baik keluarga. Soalnya ketika kita baik atau tidak, nama orang tua dan keluarga kita akan terbawa,” ujarnya.

Sosok orang tua memang sangat penting bagi Ria Sartika Azahari. Baginya mereka adalah inspirasi kehidupan. Itulah sebabnya hidupnya luluh lantak ketika ayahnya meninggal.

“Saya paling dekat dengan ayah saya. Beliau meninggal tahun 1987. Saat itu saya sedang menyusun skripsi untuk meraih gelar sarjana di FEUI,” kenangnya sambil menitikkan air mata.

Momen keterpurukannya saat berjuang meraih gelar sarjana tidak berhenti sampai di situ. Saat ia berusaha menyelesaikan studinya, dosen pembimbingnya juga meninggal. Ia sampai merasa sulit sekali meraih gelar sarjana sementara melihat teman-teman lain begitu mudah. Di saat itulah ibunya memiliki peran yang besar. Motivasi dan semangat yang selalu beliau berikan menjadi kekuatannya untuk menggapai mimpi.

“Orang tua saya selalu berkata ‘mami dan papi tidak bisa memberikan warisan materi tapi berupa pendidikan. Karena pendidikan itu adalah modal untukmu. Kemanapun kamu pergi akan tetap ada dan tidak akan hilang,’” tuturnya.



Ria bersama keluarga

Foto Dok. Pribadi

### Membawa keterwakilan suara perempuan dalam pekerjaan

Dalam menjalani pekerjaan, ia membawa sikap dan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya. Sebagai satu-satunya direktur perempuan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) saat ini, Ria berusaha membawa keterwakilan suara perempuan dalam pekerjaannya. Opiniya dapat menjadi penyeimbang pendapat dari perspektif para direktur yang mayoritas dijabat oleh pria. “Terkadang ada pertimbangan-pertimbangan yang sensitif yang tidak terpikirkan oleh kaum pria”, ujarnya. Di situlah ibu berputera satu ini bisa mengutarakan opininya untuk memberikan pandangan dari sisi kaum perempuan.

Ketika ditanya unit kerja yang paling menantang, ia menjawab masing-masing unit kerja memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya yang paling penting dalam setiap pekerjaan adalah kerja tim. “Bekerja itu ya *teamwork*, kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam tim tidak boleh seorang individu merasa *superior* dan juga merasa *inferior*,” ujarnya. Maka dari itu, dalam bekerja ia selalu berusaha mengedepankan harmonisasi hubungan antara dirinya dengan sesama pegawai maupun mitra kerja.

Harmonisasi hubungan ini juga menjadi pondasi baginya dalam menghadapi tantangan di Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD). Menangani implementasi aturan tentang penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi membuat pekerjaannya banyak bersinggungan dengan pihak eksternal baik pemerintah daerah maupun pembayar pajak.

“Tantangannya adalah ketika terjadi perbedaan interpretasi antara Pemda dan pembayar pajak terhadap sebuah aturan. Di satu sisi, pihak Pemda berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, ada kemungkinan pembayar pajak menginterpretasikan sebuah aturan untuk meringankan pajak. Biasanya jika ada dualisme interpretasi kami minta pertimbangan dari Biro Hukum dan Biro Advokasi,” tuturnya.

### Jaga komitmen dan integritas demi reputasi

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Ria memiliki harapan bahwa institusi ini akan tetap terpancang bila konsisten menjaga komitmen dan integritas. Ia juga berharap Kementerian Keuangan

akan senantiasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berempati terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil.

“Sebuah kebijakan tentu saja tidak bisa memuaskan semua pihak namun yang paling penting adalah tujuan dari kebijakan tersebut. Jika tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, saya rasa dengan sendirinya kita akan menjadi institusi yang dihargai oleh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga memiliki harapan bahwa setiap individu yang bekerja di Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk menjaga nama baik institusi. Para pegawai adalah cerminan dari institusi sehingga masyarakat akan melihat reputasi institusi dari perilaku orang-orang yang bekerja di dalamnya.

“Menurut saya salah satu hal yang akan menjadikan Kementerian Keuangan dihargai masyarakat adalah apabila setiap personil, di semua lini berusaha menjaga nama baik Kementerian Keuangan. Menjaga nama baik itu memang berat tapi saya yakin kita semua bisa,” pungkasnya.

Teks Dara Haspramudilla

# Menilik Pemerintah Berwirausaha

Sintong Arfiyansyah,  
Pegawai Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Menarik untuk diketahui bahwa pemerintah juga melakukan kegiatan “berwirausaha”. Paradigma ini populer dengan sebutan mewirausahakan pemerintah atau *Enterprising the Government*. Konsep ini dianut oleh banyak negara, salah satunya Indonesia. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mempunyai agen yang terjun langsung mengikuti arus persaingan pasar. Meskipun ikut “berwirausaha”, bukan berarti pemerintah mengutamakan keuntungan layaknya perusahaan swasta. Berwirausaha dalam konteks pemerintah mempunyai tujuan berbeda, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara kepada kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah mempunyai wakil atau agen dalam menjalankan konsep *Enterprising the Government* ini. Agen itu adalah Badan Layanan Umum atau BLU. Konsep BLU berbeda bila dibandingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang umumnya sering kita dengar. Pada BUMN, pemerintah menyertakan modalnya. Selanjutnya, kekayaan BUMN tersebut dipisahkan dari kekayaan negara. Sementara di BLU, semua asetnya

merupakan bagian dari kekayaan negara. Pendapatan BLU juga dianggap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini menggambarkan bahwa BLU merupakan bagian utuh dari pemerintah.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam APBN tahun 2018, untuk pertama kalinya pendapatan negara melampaui target. Hal ini tidak lepas dari kontribusi pendapatan BLU yang mencapai Rp53 triliun. Dalam bagian dari PNBP tersebut, pendapatan BLU hanya kalah dengan penerimaan migas dan penerimaan PNBP lainnya. Seperti diketahui, penerimaan migas meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Sementara itu, pendapatan BLU sendiri untuk tahun tersebut tumbuh sebesar 13 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah ini jauh di atas target yang dicanangkan sebelumnya sebesar Rp43 triliun. Maka, ketika penerimaan perpajakan di tahun tersebut belum menggembirakan dengan capaian sekitar 94 persen dari target, PNBP tampil layaknya penyelamat dengan raihan pendapatan yang melampaui target. Diketahui, kontribusi total PNBP mencapai Rp407 triliun, atau



Ilustrasi Dimach Putra

## Kontribusi nyata yang telah dilakukan BLU antara lain melayani 1,4 juta mahasiswa, 34 juta pasien (bersama dengan BLU Daerah), dan 340 ribu UKM.

147 persen dari target yang ditetapkan. Otomatis, capaian PNBPN memberikan daya ungkit yang signifikan dalam memenuhi target penerimaan negara.

Pada 2019 ini, pendapatan BLU juga menunjukkan pertanda baik. Sampai dengan paruh pertama tahun 2019, realisasi pendapatan BLU mencapai Rp21 Triliun atau sebesar 44 persen dari target yang ditetapkan. Jumlah ini naik 2,5 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu memberikan sinyal positif bagi potensi pendapatan negara di masa mendatang. Apalagi, BLU terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan *mindset* fleksibilitas keuangan yang dianut.

Fleksibilitas keuangan dibutuhkan guna menghadapi tantangan globalisasi yang semakin fluktuatif. Proteksi dan perang dagang yang akhir-akhir ini menghantui, perlu diantisipasi dari dalam. Caranya dengan memperkuat otot-otot fondasi ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di sinilah peran vital BLU. Sebab mereka menjadi wakil pemerintah yang langsung melayani masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuannya untuk membentuk SDM yang kompeten.

### Mengapa perlu adanya BLU?

Demi meraih tujuan utama negara, pemerintah perlu menjawab tantangan globalisasi. Dinamisasi dan persaingan global tidak bisa bila hanya diselingi dengan kekakuan birokrasi. Dibutuhkan adanya entitas pemerintah yang mampu bergerak secara lebih fleksibel dan efektif untuk menjawab tantangan tersebut. BLU diyakini bisa menjadi wakil pemerintah guna menjawab tantangan tersebut.

Sejak pertama kali dicanangkan pada 2006, jumlah BLU di Indonesia

terus meningkat bahkan semakin berkembang. Pada 2019, jumlah BLU Pusat di Indonesia mencapai 232 badan. Bidang yang menjadi fokus BLU adalah pendidikan, kesehatan, pengelola dana, pengelola kawasan, serta BLU barang jenis lainnya.

Pada prinsipnya, BLU dijalankan dengan mengacu pada praktek bisnis yang sehat, efisiensi ekonomi, dan produktifitas. Perkembangan ekonomi dunia yang semakin dinamis diyakini juga meningkatkan kebutuhan Indonesia terhadap BLU-BLU baru. Saat ini, BLU tumbuh sebagai instansi yang luwes, serta diharapkan mampu beradaptasi terhadap kondisi globalisasi maupun masyarakat.

### Peran strategis

Sebagai agen pemerintah, kontribusi BLU cukup strategis.

Kontribusi nyata yang telah dilakukan BLU antara lain melayani 1,4 juta mahasiswa, 34 juta pasien (bersama dengan BLU Daerah), dan 340 ribu UKM. Pada sisi keuangan negara, selain menyumbang PNBPN, BLU juga mengelola aset negara dengan jumlah tidak kurang dari Rp872 triliun. Hal ini mengindikasikan sentralnya peran BLU di Indonesia.

Sementara itu, BLU juga berkontribusi dalam proyek strategis nasional. Sebut saja pembangunan serat optik "Palapa Ring", program "B-20", penyelenggaraan Asian Games 2018, hingga pembangunan infrastruktur. Kontribusi inilah yang perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan utama pemerintah.

### Tantangan BLU

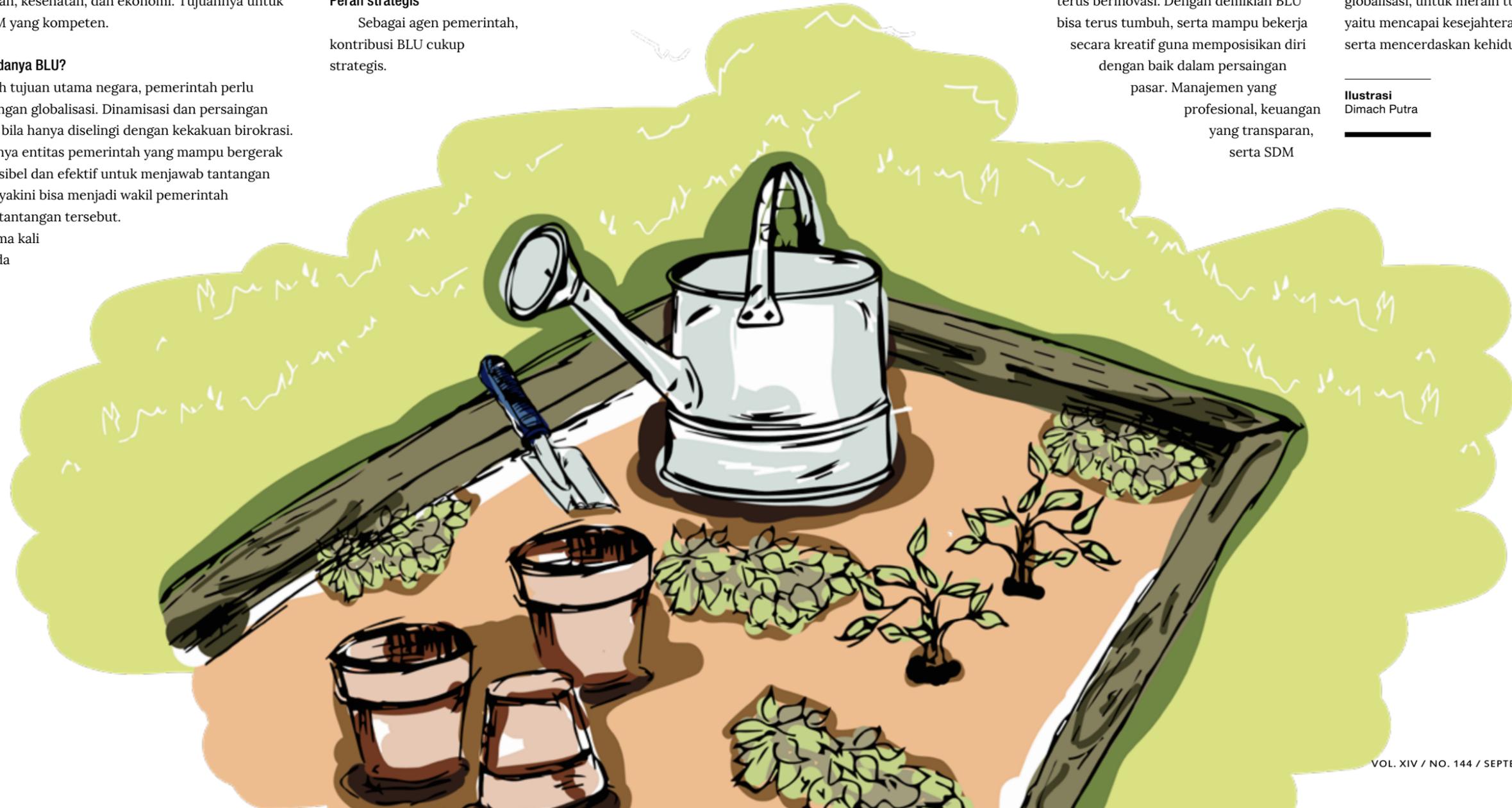
Tentu BLU mempunyai berbagai tantangan yang cukup berat sebagai wakil dari pemerintah. Meskipun tidak mencari keuntungan, BLU harus memiliki karakteristik layaknya sektor privat, seperti korporasi dan entrepreneurial. Sebagai contoh Perguruan Tinggi BLU yang harus bersaing dengan Perguruan Tinggi Swasta untuk menarik mahasiswa. Begitupun Rumah Sakit BLU yang harus bersaing dengan Rumah Sakit swasta dalam menyediakan fasilitas pelayanan yang optimal. Termasuk juga BLU Dana bergulir yang bersaing dengan perusahaan finansial dalam menyediakan kredit yang efisien bagi masyarakat.

Kondisi ini mengharuskan BLU untuk terus berinovasi. Dengan demikian BLU bisa terus tumbuh, serta mampu bekerja secara kreatif guna memposisikan diri dengan baik dalam persaingan pasar. Manajemen yang profesional, keuangan yang transparan, serta SDM

yang kompeten menjadi tuntutan sekaligus tantangan yang perlu dipenuhi BLU agar mampu berkembang. Artinya, BLU harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang tinggi dengan tetap berjalan dalam koridor instansi pemerintah yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya.

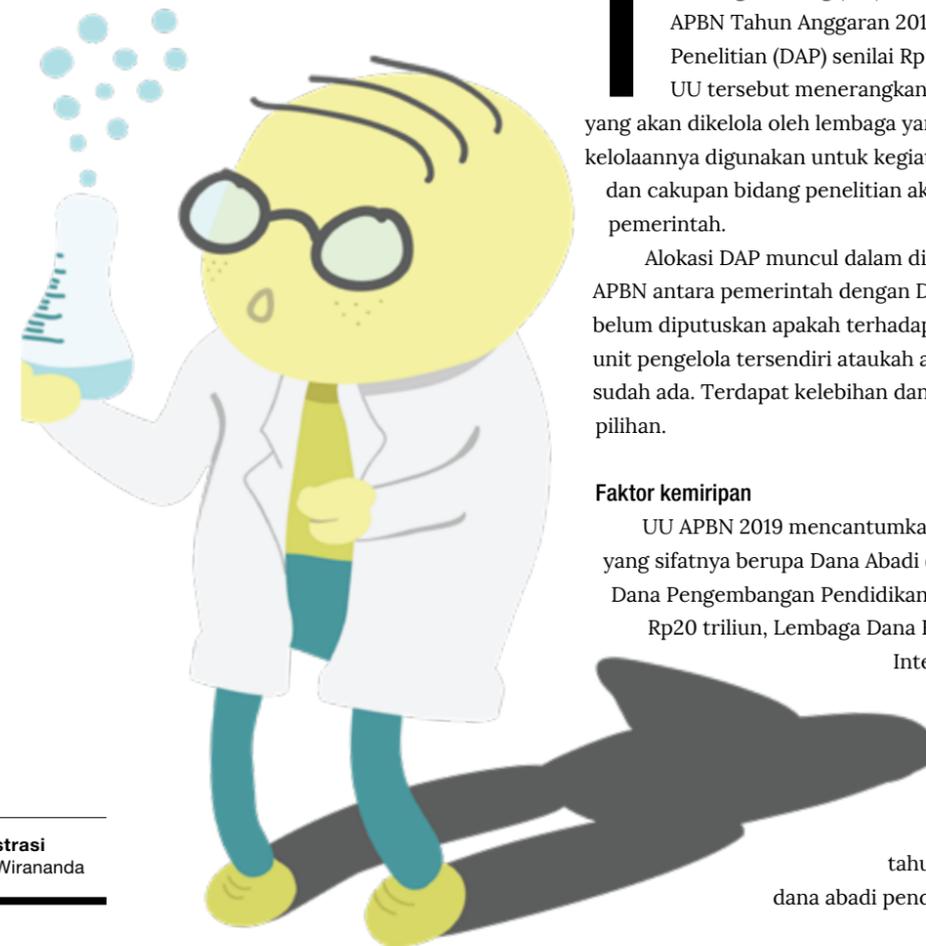
Kinerja BLU yang optimal diyakini mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar lebih tangguh, serta menguatkan faktor-faktor produksi yang ada saat ini. Itu sebabnya dibutuhkan dukungan dari setiap elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah terhadap BLU agar mampu meningkatkan kinerjanya. BLU menjadi salah satu senjata, sekaligus strategi pemerintah di tengah tantangan globalisasi, untuk meraih tujuan mulia, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Ilustrasi**  
Dimach Putra



# Dana Abadi Penelitian dan Simplifikasi Birokrasi

Rachmadi,  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Ilustrasi  
A. Wirananda

Terdapat alokasi investasi baru yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, yaitu berupa Dana Abadi Penelitian (DAP) senilai Rp990 miliar. Bagian Penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa DAP merupakan dana yang akan dikelola oleh lembaga yang akan ditunjuk, serta hasil kelolaannya digunakan untuk kegiatan penelitian. Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Alokasi DAP muncul dalam dinamika pembahasan RUU APBN antara pemerintah dengan DPR. Namun, sampai saat ini belum diputuskan apakah terhadap alokasi DAP akan dibentuk unit pengelola tersendiri ataukah akan dikelola oleh unit yang sudah ada. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap pilihan.

## Faktor kemiripan

UU APBN 2019 mencantumkan tiga alokasi investasi yang sifatnya berupa Dana Abadi (*endowment fund*), yaitu Dana Pengembangan Pendidikan nasional (DPPN) sebesar Rp20 triliun, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp2 triliun, dan DAP sebesar Rp990 miliar. DPPN merupakan akumulasi dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan. Hasil pengelolaan dana

abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan pendanaan riset. DPPN selama ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) selaku *Sovereign Wealth Fund* Pendidikan. Rencananya, LDKPI akan dikelola oleh BLU LDKPI yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.

Namun demikian, dilihat dari sasaran yang ingin dicapai serta sektor yang akan dimasuki, DAP memiliki banyak kemiripan dengan DPPN. Bentuk kemiripan tersebut diantaranya sama-sama ditujukan untuk sektor pendidikan dan sama-sama berbentuk *endowment fund*.

## Berkaca pada pembentukan BLU LPDBI/ LDKPI

Menengok ke dalam UU APBN 2018, terdapat alokasi untuk Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp1 triliun. Alokasi tersebut dititipkan sementara di kas negara lantaran proses pembentukan BLU yang bertugas untuk mengelola dana tersebut masih belum rampung hingga 31 Desember 2018.

BLU dimaksud belum dapat dibentuk lantaran muncul resistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait pembentukan unit baru. Kementerian PAN RB berpendapat bahwa dalam UU APBN 2018 tidak terdapat mandat yang menyatakan bahwa alokasi LPDBI disertai dengan pembentukan unit baru. Oleh sebab itu, mereka mensyaratkan pembentukan unit baru harus memiliki

dasar yang kuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Dapat dipastikan, resistensi serupa akan muncul jika Kementerian Keuangan mengusulkan pembentukan unit baru yang bertugas untuk mengelola Dana Abadi Penelitian kepada Kementerian PAN RB.

## Simplifikasi birokrasi

Seiring dengan reformasi birokrasi serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik. Namun demikian, inovasi semestinya tidak diidentikkan dengan pembentukan unit baru yang justru menambah gemuk struktur pemerintahan.

Beberapa waktu berselang, Presiden Joko Widodo pernah menyoroti banyaknya laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang harus dibuat oleh bendahara. Hal ini disampaikan Presiden pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2016. Ia memandang banyaknya LPJ tidak efisien serta memberi arahan agar dilakukan simplifikasi. Simplifikasi dimaksud hendaknya tidak diartikan secara sempit hanya pada laporan keuangan, tetapi juga dapat menjadi *trigger* untuk diterapkan secara luas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam lingkup pengelolaan investasi pemerintah, simplifikasi yang telah dilakukan misalnya pelaksanaan investasi pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (O/LKI). Sampai dengan tahun anggaran 2016 dasar pelaksanaan investasi pada O/LKI dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan dibuat untuk masing-masing O/LKI, sehingga dalam 1 tahun anggaran perlu diterbitkan

hingga 6 (enam) PP untuk pelaksanaan investasi pada O/LKI.

Mulai tahun 2017 dibuat terobosan dalam UU APBN sehingga pelaksanaan investasi pada O/LKI dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, PMK dibuat secara menyeluruh untuk semua O/LKI sebagai dasar pelaksanaan investasi di tahun anggaran berjalan (tidak dibuat PMK tersendiri untuk investasi ke masing-masing O/LKI). Untuk hal ini, simplifikasi dilakukan atas 2 hal sekaligus yaitu: dari sebelumnya PP menjadi PMK, dan dari sebelumnya 1 PP untuk masing-masing O/LKI menjadi 1 PMK pertahun anggaran. Akan menjadi sebuah ironi jika di tengah simplifikasi yang dilakukan, pemerintah kemudian memutuskan harus dibentuk unit pengelola baru untuk mengelola DAP. Apalagi, belum dapat dipastikan apakah alokasi DAP akan kembali muncul dalam UU APBN TA 2020 atau setelahnya.

## Memaksimalkan unit yang sudah ada

Kementerian Keuangan memiliki beberapa BLU yang bergerak di beberapa sektor. Untuk sektor pendidikan, terdapat BLU LPDP yang selama ini telah mengelola DPPN. Karakteristik DPPN sangat mirip dengan DAP, yaitu sama-sama berbentuk *endowment fund* dan didedikasikan untuk sektor pendidikan. Jika DAP (sesuai namanya) dikhususkan untuk penelitian, DPPN memiliki cakupan yang lebih luas, tetapi juga tetap mencakup penelitian. Untuk menghindari kesan seolah-olah DAP dilebur dengan DPPN, maka pengelolaan DAP dan DPPN dapat dibedakan. Cara pembedaannya misalnya dengan melakukan pemisahan rekening atau pemisahan divisi yang mengelola.

## KPP Pratama Cikupa

# Sinergi Membangun Negeri



Tangerang merupakan kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Sektor industri, perdagangan dan real estat menjadi tiga pemain utama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan potensi penerimaan perpajakan yang sangat besar di daerah tersebut. Fenomena ini menyebabkan kebutuhan dalam pelayanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak (WP) semakin besar.

Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikupa pada 5 Oktober 2015 merupakan hasil dari pemecahan kantor induk, yaitu KPP Pratama Tigaraksa. Keputusan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan pada para wajib pajak di kawasan tersebut yang terus meningkat. KPP Pratama Cikupa dipercaya melayani dan mengawasi delapan kecamatan. Secara jumlah, wilayah kerja kantor ini memang lebih sedikit dibanding kantor induknya. Namun, potensi perpajakan yang besar justru berada di wilayah kerja KPP Pratama Cikupa.

### Target penerimaan bukan beban

Komposisi wajib pajak di KPP Pratama Cikupa yang didominasi pemain besar di sektor industri, perdagangan dan real estat menjadi keunikan tersendiri bagi kantor ini. Kekhasan tersebut berbuah sebuah tantangan yang harus dilalui dalam menghimpun penerimaan negara. Kantor ini merupakan salah satu KPP Pratama dengan rencana penerimaan terbesar, yaitu sebesar 8,6 triliun rupiah. Target tersebut naik sekitar 25 persen dari realisasi penerimaan di tahun 2018.

"Kami tidak menyikapi itu sebagai beban tetapi lebih sebagai amanah dan tantangan," buka Heri Kuswanto, Kepala KPP Pratama Cikupa. Ia mengaku bahwa keyakinan tersebut didorong kepercayaannya terhadap kemampuan SDM yang dipimpinnya. Dirinya selalu berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas diri masing-masing pegawainya. Selain SDM, segenap jajaran di KPP Pratama Cikupa juga aktif menyiapkan sistem yang terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan pekerjaan mereka.

Dengan kualitas internal yang terus disempurnakan, pria yang akrab dipanggil

Heri ini yakin bahwa timnya bisa menghasilkan output yang diharapkan. Untuk mencapai itu, ia selalu menekankan pentingnya pemberian layanan prima bagi para pengguna jasa. Dirinya yakin jika itu dilakukan secara maksimal, kepuasan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga menyebabkan peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Jika semua faktor itu sudah bisa dipenuhi, target penerimaan akan semakin terasa mudah untuk dicapai. Lebih lanjut Ia menambahkan, "Yang susah adalah membangun 'software-nya', dan itu yang selalu kami kejar."

### Solusi berbasis kebutuhan terkini

Memiliki 119 orang pegawai, Kepala KPP Pratama Cikupa merasa sudah merasa tercukupi kebutuhannya dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor tersebut. Dominasi pegawai generasi milenial juga dianggapnya sebagai berkah tersendiri. Heri merasa eksistensi kaum muda dalam organisasi yang Ia pimpin menambah semangat dan juga pendekatan yang lebih kreatif dalam inovasi yang dihadirkan bagi para *stakeholders*. "Mereka

KPP Pratama  
Cikupa

Heri Kuswanto,  
Kepala KPP  
Pratama Cikupa

Loket Penelitian  
SSP sebagai  
salah satu inovasi  
khas di kantor ini

Gong Anti Korupsi  
di ruang pelayanan  
KPP Pratama  
Cikupa

Foto  
Anas Nur Huda

Foto  
Resha Aditya P.



ini selalu minta untuk diberi tantangan agar kreativitasnya muncul," Heri menambahkan, "Tapi selain itu, kami juga harus mendukung dan memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam menemukan solusi dari tantangan yang kami berikan."

Secepat jajarannya di KPP Pratama Cikupa selalu berusaha menghadirkan solusi yang benar-benar berangkat dari kebutuhan dan permasalahan yang muncul di tingkat pengguna jasa. Langkah tersebut dianggap dapat memudahkan mereka dalam menyusun proses bisnis yang efektif, efisien dan tepat guna. Salah satu contoh inovasi yang cukup membanggakan adalah adanya Loket Penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Inovasi tersebut menjadi solusi konkret yang sesuai dengan kekhasan wajib pajak khas dari sektor real estat. "Tiap tahun kami menerima permohonan validasi sebanyak 10 ribu, waktu pelayanan harus dipersingkat sepertiga dari yang sebelumnya. Itu komitmen mutu layanan kami." Jelas pria yang telah mengabdikan di Kementerian Keuangan selama 23 tahun ini.

Beragam kemudahan pelayanan yang diberikan KPP Pratama Cikupa berbuah manis. Dari indeks kepuasan layanan yang ditargetkan sebesar 75 persen, kini telah tercatat di angka 98 persen. Hingga Juli, belum ada pengaduan layanan perpajakan yang masuk, mempertahankan capaian tahun sebelumnya yang tanpa pengaduan layanan. Kepuasan layanan yang dirasakan pengguna jasa berdampak pada tingkat kepatuhan para wajib pajak dengan realisasi setoran pajak mencapai 56,59 persen hingga akhir semester I.

### Tegas berintegritas

Dengan besarnya potensi penerimaan yang dikelola, risiko pelanggaran atau *fraud* pasti juga membayangi. Namun, Heri yakin bahwa dirinya dan seluruh jajaran di KPP Pratama Cikupa memiliki integritas yang kuat untuk menghindari adanya pelanggaran tersebut. Bahkan dalam upaya menjalankan komitmen berintegritas tersebut, KPP Pratama Cikupa memiliki cara unik untuk mengukur layanannya yaitu melalui 'gong anti korupsi'.

"Kami punya gong anti korupsi di ruang pelayanan," seru Heri. Lebih lanjut Heri menjelaskan cara kerjanya, "Satu pukulan gong tanda wajib pajak setuju dengan komitmen anti korupsi kami, dua kali jika melihat adanya tindak korupsi sekecil apapun di sini." Ia bersyukur selama hampir tiga tahun memimpin belum pernah ada bunyi dua pukulan gong. "Kalau sampai terjadi mungkin itu seperti kiamat bagi kami, kami *commit* untuk menjaganya jangan sampai terjadi."

Heri mengibaratkan integritas, sebagai fondasi yang kokoh bagi organisasinya. Tanpa fondasi yang kuat, elemen-elemen lain akan goyah dan mudah runtuh. Heri sadar bahwa tugas dan amanah KPP Pratama Cikupa adalah mengeksplorasi semua potensi pajak dan merealisasikannya menjadi penerimaan negara. Kesempurnaan tercapainya tujuan tersebut hanya akan bisa dicapai dengan profesionalisme, sinergi dan pelayanan yang optimal. "Dan, kami siap menjadi wadah sinergi segenap elemen bangsa untuk membangun Indonesia," tutupnya.

Teks Dimach Putra



## Srikandi Pantang Surut Nyali

Anung Sita Pratiwi,  
Fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Pekalongan

**S**eorang ibu tiga anak menyusuri aliran sungai Pemali Juana. Ia menyusuri semak satu ke semak berikutnya, menyelip dari sisi kota ke belantara. Pada saat yang lain, ia panas-panasan mengarungi Laut Jawa menuju tanker yang lagi sandar. Semata-mata untuk mewakili negara memastikan nilai aset-asetnya.

### Dari Kota Sampai Belantara

Adalah Anung Sita Pratiwi, perempuan tangguh kelahiran Magelang. Lebih dari satu dekade ia menjalani pekerjaan nan sarat dinamika. Sejak didapat sebagai penilai kekayaan negara

pada 2007, ia telah berjumpa dengan aneka rupa aset negara berupa tanah, bangunan kantor pemerintah, rumah dinas, pelabuhan, bandara, bendungan, saluran irigasi, hutan, kapal, bahkan radar penerbangan.

Penilaian aset negara merupakan bagian yang cukup krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang kredibel, penilaian aset menjadi salah

Anung Sita Pratiwi,  
Penilai KPKNL  
Pekalongan

Ilustrasi  
Penilaian  
Barang Milik  
Negara

Foto  
Andi Al Hakim



satu poin penting. Sebab pencatatan nilai riil suatu aset akan mempengaruhi akuntabilitas sebuah laporan keuangan. Lebih-lebih, setiap aset yang dimiliki negara ini merupakan hasil dari himpunan uang seluruh rakyat Indonesia.

“Pernah (menilai) kapal tanker. Itu kapalnya di tengah laut jadi kita harus naik kapal kecil dulu dan naiknya juga harus manjat (tali),” katanya menceritakan salah satu pengalaman. Bagi Anung, perjuangan macam ini sudah nyaris jadi menu harian. Telah dan akan selalu ada mengiringi perjalanan karirnya sebagai Penilai Pemerintah.

Tak hanya panas-panasan mengarungi perairan, Anung juga mengisahkan pengalamannya menyusuri belantara. Saat itu, Anung dan tim sedang melakukan penilaian aset di sepanjang aliran sungai Pemali Juana. “Itu kami diminta untuk pakai boots segala. Karena di wilayah itu masih banyak ular,” katanya berkisah. Dari kisahnya, beberapa waktu sebelumnya bahkan ada petugas dari satuan kerja lain yang terpaksa meregang nyawa saat menyusuri belantara yang sama. Tapi Srikandi Penilai ini tak surut nyali. Demi negeri, ia rela mengadu peruntungan menyusuri belantara sepanjang aliran sungai itu. Sebagai catatan, wilayah yang dialiri sungai Pemali Juana ini terbentang

dari Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Pati. Jarak dua kabupaten ini kisaran 200 kilometer.

Menjelang tugas penilaian usai, ia justru tertimpa nahas. “Tiba-tiba saya tersambar sesuatu. Panas sekali di mata,” kata Penilai KPKNL Pekalongan ini. Anung mengaku tersambar serangga sehingga mata kanan bengkak cukup besar yang berakibat penilaian ditunda beberapa hari. Usai pulih kembali, ia melanjutkan tugasnya melakukan penilaian aset negara di sepanjang aliran sungai itu. Terdapat sejumlah bendungan dan bangunan irigasi di jalur itu yang perlu dinilai.

Tugas yang diterima Anung juga tak melulu datang dari pimpinan tertingginya. Sebagai Penilai Pemerintah, ia juga punya kewajiban memenuhi permintaan bantuan untuk melakukan penilaian aset yang dikelola satuan kerja lain. Permintaan itu akan melalui persetujuan kepala kantor terlebih dulu sebelum dijalankan oleh Anung.

### Penilai Pemerintah di Kancah Internasional

Ihwal penilaian aset memang belum begitu dikenal di masyarakat secara luas. Kendati demikian, Penilai Terbaik DJKN Tahun 2015 ini mengatakan, kompetensi Penilai Pemerintah Indonesia cukup diakui eksistensinya di kancah internasional.

“Penilai DJKN beberapa kali mendapat penghargaan di forum internasional,” katanya berkisah. Hal ini tak lepas dari dukungan dan komitmen DJKN. “Peningkatan kompetensi itu sangat diperhatikan (oleh Direktorat Penilaian DJKN),” tuturnya. DJKN juga kerap mengirimkan Penilai untuk mengikuti *short course* di beberapa negara. Pada 2017 silam, Anung berkesempatan mengikuti pelatihan tentang analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*HBU analysis*) untuk infrastruktur milik pemerintah di Belanda. Sebelumnya, ia juga menjadi bagian dalam pelatihan teknis bertaraf internasional bagi penilai properti khusus di Malaysia.

Anung pun mengaku begitu menikmati tugasnya sebagai Penilai. Dari pekerjaannya, Anung mengaku memperoleh wawasan dalam berbagai bidang. Ia juga mendapat kesempatan bergaul dengan kalangan yang lebih luas. Lulusan Manajemen Aset dan Penilaian Properti pada Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada ini berharap kelak penilai bisa menjadi profesi yang semakin dikenal dan semakin berkiprah di dunia internasional.

Teks A. Wirananda

# Berpotensi Merusak Lingkungan, Barang Impor Wajib Diekspor Kembali

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor

**P**engelolaan sampah telah menjadi isu global. Berbagai negara, termasuk Indonesia, juga mengalami kesulitan dalam mengelola sampah. Bahkan beberapa negara berupaya membuangnya ke negara lain dengan berbagai cara. Negara-negara maju banyak mengekspor sampahnya ke negara ketiga, termasuk Indonesia. Akibatnya, jenis sampah yang mengandung unsur limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga masuk ke Indonesia. Berdasarkan investigasi dari Lembaga Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton) 2019, masuknya sampah kertas impor guna menyuplai kebutuhan kertas nasional juga disertai kandungan sampah nonkertas dan sampah plastik yang merusak lingkungan. Hasil investigasi Ecoton menunjukkan bahwa impor sampah kertas disusupi oleh kontaminan sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik dengan persentase mencapai 35 persen. Hal ini diperkuat dengan analisis Badan Pusat Statistik 2019, bahwa adanya peningkatan impor sampah kertas yang masuk ke Jawa Timur sebesar 35 persen pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, dari 546 ribu ton pada 2017 menjadi 739 ribu ton pada tahun 2018.

Sebagai tindak lanjut atas upaya mengurangi masuknya barang impor ke Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak mencemarkan lingkungan hidup, Kementerian Keuangan telah membuat aturan baru mengenai ekspor kembali barang impor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang

Impor (PMK Nomor 102/PMK.04/2019) yang ditetapkan tanggal 22 Juli 2019. Dengan berlakunya PMK ini, maka PMK Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam PMK Nomor 102/PMK.04/2019, diatur beberapa ketentuan baru mengenai larangan ekspor kembali, prosedur pelaksanaan ekspor kembali, penundaan penelitian permohonan ekspor kembali, janji layanan, dan ekspor kembali yang dilakukan oleh importir yang mendapatkan pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO) atau importir produsen yang tergolong importir berisiko rendah.

**Tidak Sesuai Pesanan, Ekspor Kembali**  
Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 102/PMK.04/2019, barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain

yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), untuk diekspor kembali. Barang akan diekspor kembali apabila barang impor tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan, salah kirim, rusak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diimpor. Persetujuan atas ekspor kembali barang impor dilakukan dengan persetujuan kepala kantor pabean setempat. Adapun untuk ekspor kembali atas barang impor sementara yang telah digunakan sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan, disesuaikan dengan ketentuan tentang impor sementara dan tata laksana ekspor. Sementara, untuk ekspor kembali barang impor dengan tujuan tempat penimbunan berikat atau telah ditimbun di tempat penimbunan berikat, disesuaikan dengan ketentuan tentang tempat penimbunan berikat dan tata laksana ekspor.

## Larangan Ekspor Kembali

Ekspor kembali terhadap barang impor karena tidak sesuai dengan yang dipesan, salah kirim, rusak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diimpor, tidak dapat dilakukan apabila barang impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan. Temuan spesifik atas hasil penindakan yang menyebabkan barang dilarang diekspor kembali antara lain apabila berdasarkan pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian jumlah peti kemas atau jumlah kemasan (dalam

hal tidak menggunakan peti kemas) sebagaimana patuh untuk mendukung kelancaran arus barang dan mengurangi biaya logistik.

## Berpotensi Merusak, Barang Diekspor Kembali

Terdapat pengecualian atas larangan ekspor kembali untuk barang impor yang belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan, serta barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah atau jenis yang tidak sesuai.

Beberapa barang yang wajib diekspor kembali berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean apabila barang tersebut berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan atau lingkungan. Termasuk sampah yang mengandung limbah B3 termasuk barang yang wajib diekspor kembali karena dapat merusak lingkungan dan berpotensi mengganggu kesehatan. Barang lain yang wajib diekspor kembali adalah barang impor yang sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diekspor kembali.

## Penelitian Permohonan

Dalam rangka memberikan kepastian layanan, PMK Nomor 102/PMK.04/2019 mengatur kepastian waktu layanan bagi importir atau pengangkut yang mengajukan permohonan ekspor kembali. Proses penelitian permohonan dengan memeriksa adanya indikasi pelanggaran dilakukan maksimal dua hari kerja. Dua hari kerja tersebut tidak termasuk waktu penelitian indikasi pelanggaran, melainkan hanya apabila tidak terdapat indikasi pelanggaran. Apabila dari

hasil penelitian tidak ada indikasi pelanggaran, kantor pabean memberikan persetujuan atau penolakan ekspor kembali. Persetujuan diberikan apabila memenuhi ketentuan ekspor kembali barang impor, tidak terdapat larangan ekspor kembali atau termasuk barang yang dikecualikan dari larangan tersebut, serta belum ditetapkan sebagai Barang Milik Negara. Kantor pabean juga berhak menolak apabila tidak memenuhi ketentuan ekspor kembali barang impor, termasuk larangan ekspor kembali dan tidak termasuk barang yang dikecualikan dari larangan tersebut. Kantor pabean juga berhak menolak ekspor kembali apabila ternyata barang tersebut sudah ditetapkan sebagai Baran Milik Negara. Apabila dalam penelitian terdapat indikasi pelanggaran, kantor pabean akan menunda penelitian permohonan dengan waktu penundaan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari dengan maksimal dua kali perpanjangan. Jika terdapat bukti permulaan, maka ekspor kembali tidak dapat dilakukan. Apabila tidak ada bukti permulaan, importir atau pengangkut kembali melakukan permohonan ekspor kembali.

## Penutup

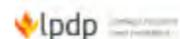
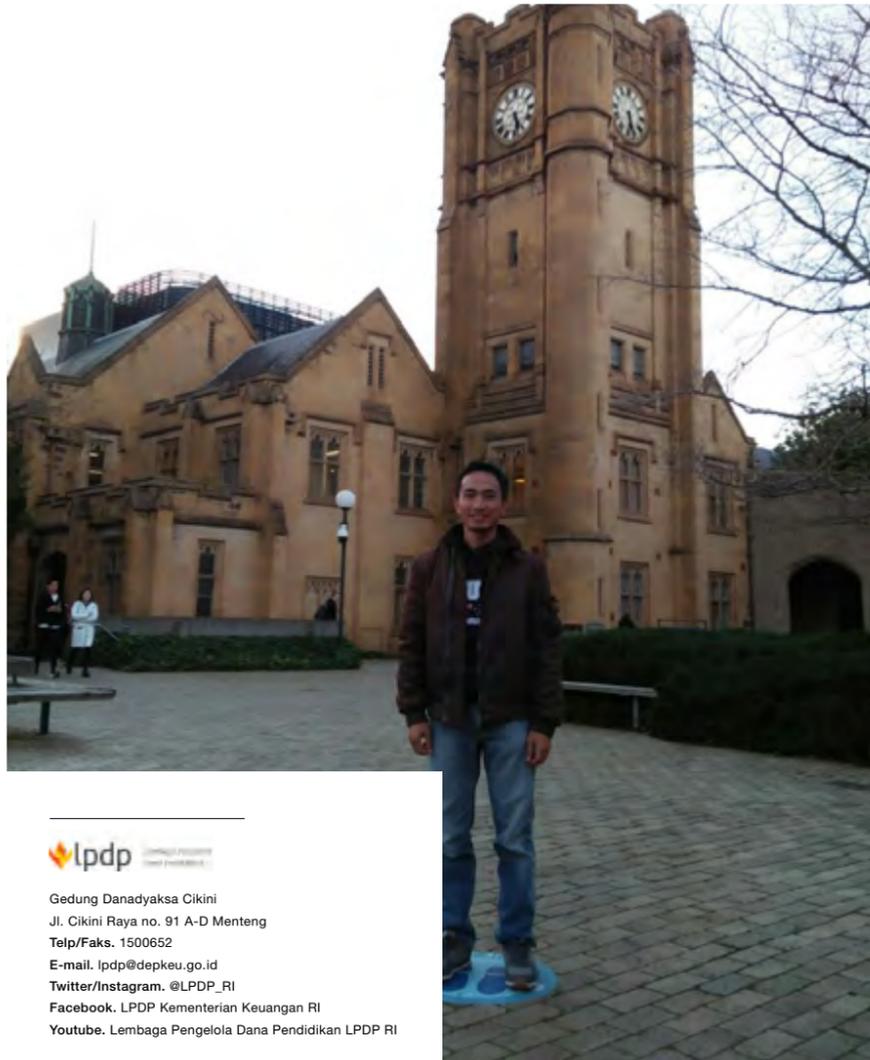
PMK Nomor 102/PMK.04/2019 memberikan kepastian hukum untuk melindungi keberlangsungan lingkungan hidup dan melarang barang yang berpotensi merusak kesehatan untuk masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Aturan ini berlaku, 30 hari –terhitung sejak tanggal diundangkannya PMK ini pada 30 Juli 2019. Dengan diberlakukannya PMK Nomor 102/PMK.04/2019, diharapkan ada tindakan tegas yang memberikan efek jera bagi importir yang tidak mematuhi.

Teks Budi Sulistyono

Ilustrasi  
A. Wirananda



# Kerja Adhul Menerangi Indonesia



Gedung Danadyaksa Cikini  
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng  
Telp/Faks. 1500652  
E-mail. lpdp@depkeu.go.id  
Twitter/Instagram. @LPDP\_RI  
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI  
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

**M**engenal Adhul, panggilan akrab lelaki bernama lengkap Arriyadhul Qolbi Nasution, begitu menyenangkan. Pemikirannya yang terbuka dan sikapnya yang rendah hati membuat betah lawan bicara untuk berlama-lama berdiskusi serta bertukar pikiran. Namun siapa sangka, di balik pembawaannya yang berpijak ke bumi itu, ayah dua anak berusia 30 tahun ini banyak memiliki prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Adhul merupakan pendiri Pelita Khatulistiwa, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

## Cahaya untuk timur Indonesia

Saat ini, Adhul tengah menuntut ilmu di University of Melbourne dengan dibiayai penuh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jauh sebelum meneruskan pendidikan masternya, Adhul lebih dulu mendirikan Pelita Khatulistiwa. Organisasi nonprofit ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer, berupa pengadaaan instalasi listrik di sejumlah puskesmas yang memiliki keterbatasan akses listrik dengan energi terbarukan. Melalui Gerakan *crowdfunding* #PatunganListrik, Pelita Khatulistiwa tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan kepedulian masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan.

Diakui Adhul, Pelita Khatulistiwa lahir karena kegundahannya saat melihat tayangan di sebuah televisi. "Tayangan tersebut menceritakan seorang perawat

daerah perbatasan yang tidak bisa menolong seorang ibu hamil karena tidak ada peralatan medis listrik di puskesmas desanya. Akhirnya, sang ibu mengalami keguguran," ungkapnya. Dari situlah ide mendirikan Pelita Khatulistiwa hadir. Adhul mengajak rekan-rekannya untuk menginisiasi sebuah gerakan pemberian listrik gratis bagi puskesmas-puskesmas terluar di Indonesia. Sasaran kegiatan ini adalah wilayah timur Indonesia. Adhul menuturkan, Pelita Khatulistiwa hadir guna membantu penyediaan sumber listrik untuk sarana umum di wilayah tersebut.

Saat ini Pelita Khatulistiwa telah menerangi tidak kurang dari empat puskesmas terpencil yang terletak di tiga Pulau di Indonesia. Puskesmas tersebut, yaitu Puskesmas Lindu di Sigi Sulawesi Tengah, Puskesmas Karataun di Mamuju Sulawesi Barat, Puskesmas Sarina di NTT, serta Puskesmas Kelay di Berau Kalimantan Timur. Sumber pendanaan berasal dari penggalangan dana yang diberikan oleh ratusan donatur di Indonesia, melalui kampanye di media sosial dan dana CSR PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero.

Adhul menceritakan, teknis yang dilakukan tidak terlalu rumit. Namun, butuh determinasi dan kesungguhan. "Intinya sih ketika di Puskesmasnya, (kami) ketemu dengan aktor lokal untuk membicarakan mengenai kerja samanya. Kemudian setelah sepakat, dilakukan instalasi pembangkit listrik, sekaligus melatih teknisi setempat. Setelah semua rampung, baru peresmian," demikian ujarnya.

Adhul percaya, menerangi Puskesmas dengan listrik, berarti mengurangi kerugian masyarakat. "Misalnya karena vaksin rusak sebab ketiadaan pendingin, atau mengurangi peluang tidak bisa dilakukan tindakan medis dengan alasan kondisi cahaya yang kurang," ungkapnya.

## Berdayakan mantan penderita kusta

Kepedulian Adhul terhadap masyarakat dan isu sosial sudah terlihat

bahkan semenjak di bangku kuliah. Pada 2010, Adhul beserta beberapa rekannya sesama mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia juga telah berkontribusi nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Melalui sebuah platform bernama Nalacity, Adhul dan rekan-rekan telah meningkatkan taraf hidup masyarakat mantan penderita kusta di Sitanala, Tangerang.

Nalacity menyediakan fasilitas keterampilan jahit-menjahit untuk kaum wanita penderita kusta di sana. Produk yang dihasilkan beraneka macam. Mulai dari jilbab, bros, serta aksesoris pakaian muslimah lainnya. Selanjutnya, Nalacity membantu memasarkan produk-produk tersebut. Tidak mengherankan, Nalacity menerima penghargaan dari Bank Mandiri sebagai juara kedua untuk Kategori Industri Kreatif Start Up.

Bagi pria penyuka gitar ini, bermanfaat bagi orang lain adalah jalan baginya mencapai kebahagiaan. "Dalam hidup yang singkat ini, saya selalu berharap agar saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Semakin bermanfaat, semakin baik karena Rasul pernah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kebahagiaan seseorang di ujung hidup akan berbanding lurus dengan seberapa banyak orang yang pernah ia bantu semasa hidup," tutur pria yang menyukai olahraga futsal, renang, serta memancing ini.

Oleh sebab itu, apapun pekerjaan yang diemban, bagi Adhul tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk bisa membantu orang lain. "Di manapun, apakah kita seorang profesional, pengusaha, ataupun akademisi, maka carilah jalan agar kita bisa memberi sesuatu untuk banyak orang," jelas Adhul.

## Bersinar sejak di bangku kuliah

Sejak menjadi mahasiswa, lelaki campuran Medan Palembang ini telah banyak membuat bangga kedua orang tuanya. Bagaimana tidak. Saat itu, Adhul menjadi *founder* sekaligus presiden

Institute of Electronics and Electrical Engineering (IEEE) *student branch* di UI pada 2009-2010. Dia juga menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Teknik UI pada tahun 2010 dan Mahasiswa Berprestasi Tingkat UI pada tahun yang sama.

Selepas menyelesaikan pendidikan sarjana, tanpa menunggu waktu lama, Adhul diterima berkarir di sebuah perusahaan *oil service multinational*. Saat ini, ia menjadi *team leader* di sebuah perusahaan minyak dan gas Internasional. Sebuah pencapaian yang besar untuk lelaki seusianya. Tidak hanya itu, pada 2015, Adhul juga berhasil memenangkan kompetisi Internasional untuk para insinyur dan ilmuwan, yaitu BP Tallow Chandlers Award, di Inggris. Diketahui, ini menjadi kali pertama penghargaan ini dimenangkan oleh orang Indonesia, setelah beberapa dekade diadakan.

## Ilmu untuk masa depan

Meski demikian, sukses dalam memulai karir tak menghapus rindunya untuk melanjutkan sekolah dan menggali ilmu lebih dalam lagi. Menurutnya, ilmu merupakan amal jariyah termudah yang dapat dilakukan, khususnya lagi apabila diajarkan kepada yang lain. Tahun ini, Adhul melanjutkan studi magisternya. Dia mendapat beasiswa penuh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"InsyaAllah saya akan memulai program Master of Energy Systems di University of Melbourne tahun ini. LPDP telah mempercayai saya untuk menerima beasiswa ini. Saya akan berusaha yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya optimis.

Adhul menyampaikan, impian berikutnya yang ingin ia capai adalah menjadi ahli energi, " (Khususnya) yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri energi di masa depan," ucapnya yakin.

Teks Triana Lestari



## Akses Dokumen Hukum di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara dengan mudah lewat **aplikasi JDih Kemenkeu Mobile**

scan untuk unduh



Bugar



Foto  
Resha Aditya

Ilustrasi  
A. Wirananda

Kanker prostat terjadi akibat berkembangnya sel-sel ganas yang tidak terkendali pada jaringan prostat. Gejala utama yang muncul ialah kesulitan buang air kecil (BAK). Gejala lain seperti keluar darah saat BAK dapat terjadi akibat peradangan. Selain itu, penurunan berat badan juga terlihat jelas hingga terjadinya kematian. Kanker prostat berbeda dengan BPH (*Benign Prostatic Hyperplasia*). Pembesaran prostat pada BPH tidak disertai pertumbuhan sel kanker dan tidak mematikan, meskipun terkadang sedikit agresif sehingga menimbulkan gangguan BAK.

Menurut WHO, kanker prostat menduduki peringkat kedua dalam urutan kanker tersering pada pria. Sebab sifatnya yang tidak seagresif kanker lain, kanker prostat sulit untuk dideteksi lebih awal. Akibatnya, ia lebih sering dijumpai pada stadium lanjut.

Penyebab utama mutasi sel-sel kanker prostat sampai sekarang belum diketahui. Walakin, besar kemungkinan faktor keturunan berperan besar di dalamnya. Seorang pria dengan riwayat keluarga penderita kanker prostat atau kanker lain berisiko memiliki sel-sel yang rawan bermutasi secara tak terkendali di dalam tubuhnya. Pola makan yang tidak sehat pada pria dengan riwayat keluarga kanker juga menaikkan risiko terjerat kanker prostat.

Faktor usia turut berpengaruh besar; risiko kanker prostat kian meningkat pada pria dengan usia di atas 65 tahun. Paparan zat kimia seperti senyawa kadmium (senyawa logam dalam rokok) juga mesti diwaspadai. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kanker prostat yaitu obesitas, penyakit menular seksual (gonore dan *clamidia*), serta vaskektomi.

Terdapat beberapa langkah pencegahan untuk menurunkan risiko terkena kanker prostat. Pertama, perbanyak konsumsi sayuran dan buah, terutama yang berwarna merah, jingga, dan ungu. Kadar antioksidan tinggi pada sayuran dan buah tersebut berfungsi melawan sel-sel kanker dan radikal bebas di dalam tubuh.

Kedua, terapkan pola hidup sehat. Lakukan olahraga rutin setiap hari serta kurangi konsumsi makanan berlemak, makanan yang diasinkan, makanan kalengan, serta makanan berwarna kimia. Ketiga, berhenti merokok. Rokok merupakan penyebab utama tumbuhnya sel kanker dalam tubuh.

## Jerat Kanker Prostat

dr. Rizki Dinar E.  
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

**P**emahaman tentang prostat belum jamak dimiliki masyarakat. Sebagian salah mengartikannya sebagai skrotum atau jaringan berisi testis. Kenyataannya bukan demikian. Prostat merupakan kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar kandung kemih seorang pria. Kelenjar ini mengelilingi saluran ureter yang akan membawa urine keluar dari penis. Fungsinya cukup penting bagi pria lantaran menghasilkan semen atau cairan yang dikeluarkan bersama sperma saat terjadi ejakulasi.

# Terba(l)ik

ini yang terbaik / apapun yang terjadi / aku percaya / semua ada hikmah / tapi / memang begitu memberatkan / ketika kegagalan datang / dan / keputusan / ternyata berhasil melumpuhkan

Sore itu, setelah hujan reda, tampak gurat pelangi dari kaca jendela di ruang kerja kami. Oleh karena tak ingin melewatkan kesempatan untuk mengabadikan, Saya pun beranjak mengambil kamera DSLR. Selanjutnya, bersama dengan beberapa rekan, Saya menuju *rooftop* sebagai tempat tujuan mengambil gambar. Tergesa menunggu lift untuk naik, lalu bergegas menaiki tangga darurat. Berharap betul bisa memperoleh hasil foto terbaik dengan objek gambar pelangi. Sayang, setibanya kami di atas, sang pelangi telah lebih dulu menghilang.

Sekeping contoh sederhana. Ketika kesempatan datang, lalu kita sudah berupaya maksimal. Namun, hasilnya tak sesuai dengan harapan. Berkebalikan. Mungkin diantara kita pernah mengalaminya.

Ketika ikut UPKP (Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat), misalnya, atau seleksi beasiswa. Kita sudah belajar siang-malam, menekuni simulasi tipe-tipe soal yang akan diujikan, mengikuti program IELTS/TOEFL *Preparation*, serta tak lupa meminta doa dari orang tua dan kerabat. Akan tetapi

saat pengumuman, kita tidak lulus seleksi. Contoh lain barangkali ada diantara kita yang merasa telah berkinerja baik, serta mengikuti *assessment* dengan begitu prima. Namun, begitu ada promosi jabatan, nama kita tidak masuk dalam daftar pelantikan. Sungguh menyakkan.

Seringkali kita merasa telah melakukan yang terbaik. Namun, janganlah lupa bahwa hasil tak selalu sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Tiap kejadian dalam hidup punya skenarionya sendiri. Tidak terbatas pada andil manusia saja. Maka, sudah selayaknya kondisi ini kita mitigasi. Caranya dengan mengupayakan yang terbaik, tetapi tetap bersiap untuk hasil terburuk.

Begitupun dalam memaknai kegagalan. Ada kalanya kita perlu melihat dengan cara yang berbeda, bahkan berlawanan. Ada pelajaran ketika kita dengan bijaksana mengganti sudut pandang. Bisa jadi, kita dikondisikan untuk berada di salah satu titik perjuangan, bukan untuk merayakan keberhasilan yang diharapkan, melainkan untuk mensyukuri sesuatu yang seringkali luput dari pandangan.

Seperti pada contoh sederhana

sebelumnya, kami gagal memotret pelangi yang sudah dikejar sedemikian rupa. Namun, ketika kami mengalihkan pandangan ke arah berlawanan, ternyata ada semburat senja yang menghiasi lanskap ibukota dan tak kalah istimewa. Akhirnya kami pun menikmati senja dan berhasil mengabadikannya.

Bisa jadi, bila saat ini kita belum lulus UPKP ataupun seleksi beasiswa, disebabkan karena instansi masih membutuhkan sumbangsih dan peran kita. Pelantikan jabatan yang kali ini belum bisa kita rasakan, barangkali karena ada jabatan lain yang lebih tepat untuk kita emban di waktu yang akan datang.

Pun pada paragraf pembuka tulisan ini. Jika sekarang kita membacanya dari bagian belakang, kita akan menemukan makna lain yang berkebalikan.

*ternyata berhasil melumpuhkan / keputusan / dan / ketika kegagalan datang / memang begitu memberatkan / tapi / semua ada hikmah / aku percaya / apapun yang terjadi / ini yang terbaik*

Jadi, apakah selama ini kita memberikan respons terbaik? Atau terbalik?

Foto  
Resha Aditya  
Pratama

Teks Arif Musafa

## New York, Titik Temu Dua Insan yang Kehilangan

Raia yang sangat mencintai dunia literasi seakan tak mampu menuliskan apapun di laptop yang setia dibawanya menyusuri sudut-sudut kota New York. Ya, menyusuri sudut kota New York hanya untuk mencari inspirasi yang seakan hilang tak berbekas

Raia Risjad adalah seorang penulis yang sedang mengalami *writer's block* dengan ide menulisnya karena baru saja kehilangan 'muse' yang tak lain adalah mantan suaminya. Selama dua tahun sejak buku terakhirnya terbit, ide-idenya seakan tersumbat sehingga dia memutuskan untuk pergi sejenak menjauh dari hingar bingar Jakarta menuju ke New York dan tinggal di apartemen sahabatnya Erin. Selama berjam-jam setiap dia membuka laptopnya untuk menulis, tidak pernah ada hasil. Hanya layar kosong dengan kursor yang berkedip-kedip seakan mengejeknya untuk segera menuliskan sesuatu di layar.

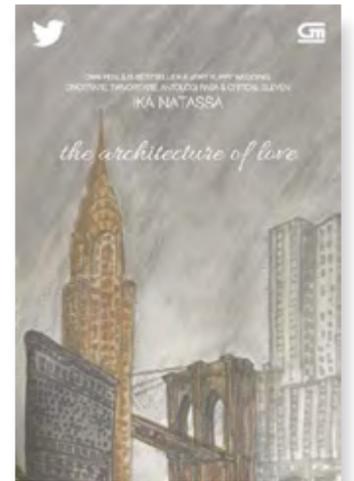
Sementara, River Jusuf, seseorang yang tidak sengaja ditemui Raia di malam tahun baru yang bertempat di apartemen adik River (Aga), adalah pria misterius dengan kaus kaki hijaunya yang selalu membawa pensil dan buku sketsa. River juga tengah mengasingkan diri sejenak karena baru saja ditinggal istrinya. Profesinya adalah seorang arsitek yang juga merupakan salah satu *founder* Panacea Architects lulusan Cornell University yang membuka jasa arsitek bersama sahabatnya bernama Paul di Jakarta.

Pertemuan tidak sengaja di malam tahun baru itu seakan menjadi awal bagi Raia dan River untuk berdamai dengan

kenyataan yang memaksa mereka untuk "lari" dari masa lalu yang selalu menghantui mereka. Selama dua bulan sejak pertemuan di malam tahun baru, mereka rutin bertemu dan berkeliling New York. Pertemuan-pertemuan ini perlahan akan menguak tabir masa lalu yang membuat mereka masing-masing harus menepi sejauh mungkin dari memori kelam dan kemudian berdamai untuk melanjutkan masa depan. Dan tentu saja, segala konflik dan dilema akan mewarnai perjalanan mereka kembali menemukan arah.

Buku setebal 304 halaman bersampul coklat dove dengan gambar *landmark* kota New York ini merupakan karya kedelapan Ika Natassa. Konflik dan alur cerita di dalamnya dikemas apik oleh Ika Natassa melalui kekuatan dialog serta penggambaran setting yang dibangun. Selain itu, hal menarik selanjutnya adalah proses unik kelahiran novel ini. Ika Natassa melibatkan pembaca untuk menentukan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya melalui fitur *poll* di twitter. Sentuhan personal tersebut tentu membuat para *netizen* dan pembaca lain sangat antusias dengan ceritanya sendiri, tidak sabar dengan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Peresensi Primas Anggono



**Judul:**  
The Architecture of Love

**Pengarang:**  
Ika Natassa

**Tahun Terbit:**  
2016

**Dimensi:**  
304 Halaman

Kunjungi Perpustakaan  
Kementerian Keuangan  
dan Jejaring Sosial Kami:  
Gedung Djuanda I Lantai 2  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta Pusat



Perpustakaan  
Kemenkeu  
Perpustakaan  
Kementerian  
Keuangan  
@kemenkeuilb

www.perpustakaan.  
kemenkeu.go.id

### 5 Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 **Bumi Manusia**  
Pramoedya Ananta Toer
- 2 **The Power of Habit**  
Charles Duhigg
- 3 **Si Anak Badai**  
Tere Liye
- 4 **Tapak Jejak**  
Fiersa Besari
- 5 **Sutopo Purwo Nugroho Terjebak Nostalgia**  
Fenty Effendy



# Daya Pikat Tarek Pukat

**T**anah air kita Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan ragam tradisi budaya dari berbagai daerah. Terdapat satu tradisi menarik yang masih senantiasa dijalankan hingga kini selama ratusan tahun di pesisir provinsi paling barat Indonesia. Tradisi ini jamak ditemui di Pantai Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Namanya Tarek Pukat.

Tradisi menjaring ikan yang dilakukan sekaligus oleh beberapa orang nelayan ini merupakan budaya turun temurun peninggalan abad ke-16. Tarek Pukat telah dilakoni masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Jaring ikan yang digunakan nelayan berukuran besar dan lebar. Oleh sebab itu, dibutuhkan sejumlah nelayan supaya kuat untuk menariknya ke tepi pantai. Setelah menarik pukat, ikan yang terjaring tersebut langsung dijual oleh para nelayan. Tentunya ikan tersebut masih segar. Hal itu juga yang menjadi daya pikat lain Tarek Pukat. Banyak pembeli rela menunggu demi memperoleh ikan segar yang baru saja diangkat dari laut.

Hampir seluruh pantai di Aceh masih melakukan tradisi Tarek Pukat. Namun, Tarek Pukat di Gampong Jawa memang paling menarik perhatian. Pantai ini menjadi tempat yang difavoritkan untuk dikunjungi masyarakat sekitar maupun para wisatawan. Dalam sehari,

para nelayan di Pantai Gampong Jawa melakukan Tarek Pukat setidaknya tiga kali, yaitu kala pagi, siang, dan sore. Akan tetapi, masyarakat sekitar dan para wisatawan yang ingin menonton atraksi tersebut lebih banyak memilih waktu sore hari.

Suasana sore menjelang terbenamnya matahari membuat Tarek Pukat terasa lebih indah dan syahdu untuk dinikmati. Pemandangan ini menjadi daya pikat tersendiri, terutama bagi para penggemar fotografi. Banyak kesempatan emas untuk mengambil foto lantaran banyak momen-momen penuh ekspresi dan gestur dari para nelayan saat menarik jala. Momen-momen tersebut menambahindahkannya komposisi foto yang kita abadikan. Jadi, jangan heran ketika kita mengunjungi Pantai Gampong Jawa, terlihat fotografer-fotografer berkeliaran di tepi pantai, asyik mencari momen terbaik dari atraksi Tarek Pukat.

Waktu itu sedang musim Angin Muson Barat tatkala saya dan teman-teman mengunjungi Pantai Gampong Jawa. Hasil ikan yang didapat para nelayan sedikit lantaran angin membawa sampah-sampah menuju tepi pantai. Namun, atraksi Tarek Pukat tetap menarik untuk ditonton dan diabadikan. Apalagi saya berada di lokasi tersebut pada sore hari, kala air laut bermandikan cahaya matahari.

Satu hal yang dapat saya lihat dengan jelas dari Tarik Pukat ialah rasa kebersamaan para nelayan. Mereka bersama-sama dan bersinergi demi mencapai tujuan utama: membawa pukat/jaring besar beserta ikan segar ke tepi pantai. Ini pula yang menjadi filosofi dasar terciptanya Tarian Tarek Pukat. Dalam tarian tersebut, para penari saling mengaitkan tali satu sama lain. Kemudian, para penari menarik tali tersebut bersama-sama. Tali-tali itu nantinya akan membentuk sebuah jaring. Tarian ini mencerminkan daya pikat utama Tarek Pukat, yaitu sikap gotong royong dan kebersamaan para nelayan.

**Teks dan Foto** Habibullah Yusyaf (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)

Suasana sore menjelang terbenamnya matahari membuat Tarek Pukat terasa lebih indah dan syahdu untuk dinikmati.

# Rencana Keuangan Menuju Keluarga Bahagia

Saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah semakin lama orang menikah menjadi semakin tidak bahagia? Harusnya tidak dong... Di agama juga diajarkan kalau kita sudah mampu, baik fisik atau rohani, kita akan dianjurkan untuk segera menikah. Sampai pada akhirnya saya menjumpai banyak fenomena bahwa pasangan suami istri seringkali menghadapi *problem* yang membuat pusing tujuh keliling meskipun usia pernikahan mereka sudah cukup lama.

Banyak permasalahan rumah tangga tersebut bersumber dari kurangnya perencanaan keuangan keluarga sejak dini. Kita tidak sedang membicarakan tentang anak pacaran yang berdiskusi tentang kehidupannya setelah pernikahan. Tetapi, yang kita bicarakan adalah tentang sebuah keluarga muda, dimulai dari hari pertama sejak mereka resmi menyandang status sebagai suami istri.

Lalu, apa yang harus diperhatikan saat menyusun perencanaan keuangan keluarga?

Pertama yaitu pernak-pernik cicilan. Cicilan berbunga rendah adalah salah satu bisnis paling menguntungkan. Makanya jangan pernah berpikir "mumpung dapat diskon bunga", karena bagaimanapun

bunga akan selalu ada. Cicilan berarti Anda harus menghitung dengan baik *cashflow* keluarga. Selain itu, jangan sampai terlambat membayar cicilan Anda karena akan berujung denda. Saran saya, jika Anda memang tidak butuh dan tidak mampu, jangan terjebak di pernak-pernik cicilan. Kalau mampu, bayar saja *cash*!

Yang kedua adalah target harta yang ingin dimiliki. Ketika kita membicarakan tentang perencanaan keuangan di level keluarga, pasti berujung pada hasil akhir. Wajar jika kalian berharap punya ini-itu setelah sekian tahun berkeluarga dan bekerja keras bersama pasangan.

Misalnya pada tahun kedua, Anda dan pasangan menargetkan harus memiliki mobil karena diperkirakan sudah memiliki anak sehingga mobilitas dengan kendaraan roda dua akan merepotkan. Atau keinginan suami istri untuk memiliki rumah sendiri di tahun ketiga setelah tinggal di apartemen. Jadi, inti poin kedua ini adalah kalian harus memiliki target yang realistis.

Berikutnya adalah biaya pendidikan. Tentu sebagai orang tua, kalian ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Pertanyaannya, kapan anak Anda masuk SD atau TK? Saran saya, segera siapkan dana pendidikan anak paling tidak satu tahun sebelumnya. Lalu bagaimana

untuk menyiasati kenaikan biaya sekolah yang tiap tahunnya pasti naik? Untuk menjaga nilai dana pendidikan Anda, maka berinvestasilah pada produk-produk investasi yang rendah risiko dan rendah biaya. Untuk jangka waktu penyimpanan 1-3 tahun, surat berharga dari pemerintah seperti SBR layak untuk Anda lirik sebagai tabungan dana pendidikan anak.

Terakhir adalah asuransi.

Kenyataannya tidak semua asuransi yang ada kita butuhkan. Apalagi premi bulanan asuransi juga bukan nominal yang kecil. Oleh karenanya, cari asuransi dengan skala prioritas. Urutan prioritas asuransi adalah asuransi yang berhubungan dengan nyawa, pekerjaan, dan perlindungan harta Anda seperti rumah atau mobil.

Saya menyarankan Anda untuk mulai belajar menjadi perencana keuangan bagi diri sendiri dulu, karena ini akan sangat membantu kemampuan perencanaan keuangan keluarga Anda. Namun, apabila memang Anda merasa kepayahan dan membutuhkan bantuan, maka carilah *financial planner* untuk membantu pengelolaan uang Anda.

**Andhika Diskartes,**  
Perencana Keuangan, founder *diskartes.com*, dan penulis buku *Investory* dan buku *Investory "X"*.

# Mas Praim



## "WEEKEND SANTUY"

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi



**HARI OLAHRAGA NASIONAL  
3 SEPTEMBER 2019**

Foto:  
Anas Nur Huda



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**